4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis dan Topografi Kota Probolinggo

Kota Probolinggo secara geografis terletak pada 7º 43' 41" sampai dengan 7º 49' 04" Lintang Selatan dan 113º 10' sampai dengan 113º 15' Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km² yang terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan, dan Kecamatan Wonoasih. Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya (Administrator, 2010).

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolingo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Sumberasih Kab. Probolinggo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Kota Probolinggo terbagi dalam 3 (tiga) Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 11 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 9 Kelurahan, dan Kecamatan Wonoasih terdapat 9 Kelurahan. Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter dia atas permukaan air laut. Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0 - 10 meter, ketinggian 10 - 25 meter, ketinggian 25 - 50 meter. Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun demikian seluruh wilayah Kota Probolinggo relatif

berlereng (0 – 2%). Hal ini mengakibatkan masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah ini (Administrator 2010).

Lebih jelasnya untuk mengetahui lokasi penelitian Skripsi dapat dilihat pada peta Kota Probolinggo Lampiran 1.

4.1.1.1 Keadaan Umum Kecamatan Mayangan

Secara geografis, Kecamatan Mayangan terletak pada 7^0 43^0 Lintang Utara (LU) dan 113^0 Bujur Timur (BT). Luas Kecamatan Mayangan 19.308 KM^2 dengan suhu udara maksimal 32^0, suhu udara minimal 26^0, dan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Batas Wilayah dari Kecamatan Mayangan ini adalah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : Selat Madura
2) Sebelah Selatan : Kecamatan Kanigaran
3) Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan
4) Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Kecamatan Mayangan merupakan Bagian dari unsur Perangkat Daerah Kota Probolinggo, dimana dalam sistem Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Camat dengan Tingkat Eselon III a yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Probolinggo.

Kecamatan Mayangan menempati gedung Pemerintah Kota Probolinggo di Jalan Ikan Paus Nomor 34 Probolinggo. Kecamatan Mayangan merupakan salah satu Kecamatan dari Tiga Kecamatan se-Kota Probolinggo yang membawahi 5 Kelurahan yaitu :

1) Kelurahan Mayangan
2) Kelurahan Mangunharjo
3) Kelurahan Wiroborang
4) Kelurahan Jati

5) Kelurahan Sukabumi

Orbitasi atau jarak Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ini dari pusat-pusat pemerintahan adalah berjarak :

1) Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 0,5 Km
2) Jarak dari Kota Dati II : 1,75 Km
3) Jarak dari Ibukota Propinsi Dati I : 100 Km
4) Jarak dari Ibukota Negara : 1000 Km

Letak Kecamatan Mayangan yang strategis dari pusat pemerintahan Kota Probolinggo ini menjadikan Kecamatan Mayangan sebagai kecamatan yang memiliki sentra pengembangan pembangunan yang mendukung. Salah satu diantaranya adalah adanya PPP Mayangan yang baru yang lokasinya sekitar 1 km di sebelah timur Pelabuhan Tanjung Tembaga, dan lokasinya yang sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dari Kota Probolinggo.

4.1.1.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Mayangan

Di daerah setempat mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani tambak dan nelayan. Jumlah penduduknya yaitu 62.129 jiwa terdiri dari 30.586 laki-laki dan 31.477 perempuan. Masyarakat Kelurahan Mangunharjo, Jati, Sukabumi, Wiroborong, Mayangan Kecamatan Mayangan ini bermata pencaharian sebagai PNS, wiraswasta, petani, nelayan, pertukangan, buruh tani, pensiunan, buruh pabrik, sopir, montir / bengkel, tukang becak, konfeksi, jasa, pengangguran, dan lain-lain. Keadaan penduduk sesuai jumlah penduduk dan mata pencaharian di Kecamatan Mayangan tersaji pada Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Dirinci per Kelurahan Tahun 2010

No	Kelurahan	Penduduk		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1	Mayangan	5.445	5.495	10.940
2	Mangunharjo	9.623	9.990	19.613
3	Jati	7.022	7.303	14.325
4	Sukabumi	5.361	5.481	10.842
5	Wiroborang	3.135	3.208	6.343
Jumlah		30.586	31.477	62.129

Sumber: Kecamatan Mayangan 2010

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
Karyawan : • Pegawai Negeri Sipil • TNI / POLRI • Swasta	 1.447 237 2.703
Wiraswasta	4.904
Tani	442
Pertukangan	362
Buruh Tani	414
Pensiunan	1408
Nelayan	3306
Buruh Pabrik	2967
Jasa	467
Sopir	3269
Montir	135
Tukang Becak	965
Jumlah	**22826**

Sumber : Kecamatan Mayangan 2010

4.1.1.3 Kelembagaan

Segala kegiatan penangkapan di Probolinggo ini dibawahi dan diatur oleh beberapa lembaga formal, antara lain :

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang mana dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Mayangan.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Mayangan merupakan pelabuhan perikanan yang ada di Kota Probolinggo. UPPPP

Mayangan diresmikan tanggal 29 Desembar 2007 oleh Presiden RI Jendral (Purn) Susilo Bambang Yudoyono di PPP Tamperan Pacitan. Kondisi UPPPP Mayangan Kota Probolinggo saat ini belum operasional secara maksimal dikarenakan dermaga sisi barat masih dalam proses penyelesaian pembangunannya, namun demikian sebagian kapal Balai sudah melaksanakan aktifitas bongkar muat di kolam PPP Mayangan pada bulan februari 2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor : 061.1/1137/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Mayangan Kota Probolinggo yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga / Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.

- **V i s i**

  Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo mempunyai visi yaitu Meningkatkan Kemampuan Pelabuhan Perikanan Dalam Penyelenggaraan Usaha Perikanan Tangkap Yang Ekonomis. Artinya Kemampuan Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo merupakan pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap dalam berproduksi pada fasilitas yang telah dimiliki sekarang.

  Penyelenggaraan usaha perikanan tangkap yang ekonomis merupakan arti dari masyarakat perikanan / nelayan, pengusaha besar dan kecil agar mendapat manfaat selama berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo.

➢ **M i s i**

Misi yang dimaksud gerakan kerja dan upaya yang sistimatis, terarah dan berkesinambungan dalam menumbuh kembangkan visinya, untuk itu dibutuhkan misi UPPPP Mayangan Probolinggo, antara lain :

a. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat kebutuhan dan pertumbuhan usaha perikanan.
b. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima dan koordinasi dalam tugas operasional.
c. Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan Penangkapan ikan pada Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

- Kedudukan Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo adalah sebagai lembaga persiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Daerah.
- Tugas pokok Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo adalah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Dinas Perikanan Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo mempunyai fungsi

a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan memberi bimbingan dan pembinaan kepada nelayan, bakul pengolah hasil perikanan dan menyusun statistik perikanan sesuai petunjuk dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Melaksanakan kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai dengan uraian tugas dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Melakukan pengamanan, pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Probolinggo masih tergolong baru sehingga sarana dan prasarana untuk operasiaonalnya masih kurang memadai. Tempat Pelelangan Ikan di dalam PPP Probolinggo merupakan salah satu fasilitas fungsional. Fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan ini adalah untuk meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok yang dapat menunjang segala aktifitas di pelabuhan. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan menggunakan sistem pelelangan. Sedangkan pelelangan ikan adalah kegiatan di suatu tempat pelelangan ikan yang berguna untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli ikan sehingga terjadi tawar menawar harga ikan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan demikian sistem pelelangan ikan ini adalah salah satu mata rantai dari tata niaga ikan pada pelabuhan perikanan. Dalam pelaksanaan lelang sendiri masih belum terjadi lelang secara murni dalam menentukan harga hanya kesepakatan dari penjual dan pembeli.

Fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen.
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.
3. Meningkatkan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan.
5. Sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan tangkap.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan

Selain Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pelaksana teknis dilapang terdapat juga instansi yang sebagai pengawas yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Dinas Kelautan dan Perikanan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Probolinggo.

Menurut Administrator (2004), adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kelautan dan perikanan;
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan; dan
4. Melaksankan tugas lain yangdiberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi dan misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo ini adalah sebagai berikut :

- VISI : Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Yang Bertanggung jawab Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- MISI :
  1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan
  2. Pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir
  3. Mewujudkan peran sektor kelautan dan perikanan
  4. Sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelautan dan perikanan.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan terletak di pesisir selatan Propinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif terbagi atas 12 wilayah kecamatan, 5 kelurahan, dan 171 desa dengan posisi antara 110'55'' – 111'25'' Bujur Timur dan 7'55'' – 8'17'' Lintang Selatan. Luas keseluruhan Kabupaten Pacitan adalah 1.389,8742 km² dengan luas wilayah laut mencapai 523,82 km². Potensi yang dimiliki cukup beragam mulai dari potensi kelautan, potensi pesisir dan potensi untuk pengembangan budidaya ikan di wilayah darat (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, 2009). Rincian administratif masing-masing daerah di Kabupaten Pacitan tersaji pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rincian administratif masing-masing daerah di Kabupaten Pacitan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Lokasi Pantai
1.	Donorojo	12	4
2.	Punung	13	-
3.	Pringkuku	13	5
4.	Pacitan	25	3
5.	Kebonagung	19	7
6.	Arjosari	17	-
7.	Nawangan	9	-
8.	Bandar	8	-
9.	Tegalombo	11	-
10.	Tulakan	16	1
11.	Ngadirojo	18	2
12.	Sudimoro	10	4

Sumber: Badan Pusat Statistik 2009

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang terletak 276 km dari kota Surabaya, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan ± 140 km dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara rinci, batas – batas Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Ponorogo
Sebelah Timur	:	Kabupaten Trenggalek
Sebelah Selatan	:	Samudera Indonesia
Sebelah Barat	:	Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Luas keseluruhan Kabupaten Pacitan adalah 1.389,8742 km² dengan luas wilayah laut mencapai 523,82 km².

4.1.2.1 Keadaan Umum Kecamatan Pacitan

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terletak di Kecamatan Pacitan kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan. Kecamatan Pacitan merupakan pusat kota Kabupaten Pacitan. Batas batas wilayah Kecamatan Pacitan adalah :

- Sebelah utara : Kecamatan Arjosari
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kecamatan Pringkuku
- Sebelah timur : Kecamatan Kebonagung

Luas willayah Kecamatan Pacitan adalah 77,11 km^2 yang terbagi dalam 5 Kelurahan dan 25 Desa. Kewenangan laut (batas 4 mil) Kecamatan Pacitan seluas 19, 17 km^2 dengan panjang garis pantai 2,574 km. Terdapat 2 Kelurahan dan 1 Desa pantai yang berada di Kecamatan ini yaitu Kelurahan Sidoharjo, Ploso dan Kembang. Meskipun demikian, penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan tidak hanya berasal dari ketiga daerah tersebut saja. Salah satu desa yang tidak mempuyai wilayah pesisir, tetapi penduduknya banyak berprofesi sebagai nelayan dan pengolah hasil perikanan adalah Desa

Sirnoboyo. Kondisi sepanjang pantai terdiri dari pantai yang keseluruhannya landai, sedangkan Kelurahan Sidoharjo dan Desa Kembang terdiri dari pantai yang curam dan terjal (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, 2009). Jumlah Dusun, status wilayah dan letak geografis Kecamatan Pacitan tersaji pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Jumlah Dusun, status wilayah dan letak geografis Kecamatan Pacitan

No	Desa/ Kelurahan	Dusun	Status		Letak	
			Perkotaan	Pedesaan	Pantai	Bukan Pantai
1.	Sidoharjo	12	1	-	1	-
2.	Ploso	8	1	-	1	-
3.	Kembang	5	-	1	1	-
4.	Sukoharjo	4	-	1	-	1
5.	Kayen	7	-	1	-	1
6.	Sirnoboyo	4	1	-	-	1
7.	Arjowinangun	4	1	-	-	1
8.	Baleharjo	2	1	-	-	1
9.	Bangunsari	6	-	-	-	1
10.	Sedeng	8	1	1	-	1
11.	Sumberharjo	2	1	-	-	1
12.	Pucangsewu	2	1	-	-	1
13.	Pacitan	2	1	-	-	1
14.	Tanjungsari	5	1	-	-	1
15.	Menadi	4	1	-	-	1
16.	Mentor	3	1	-	-	1
17.	Purworejo	6	1	-	-	1
18.	Nanggungan	3	1	-	-	1
19.	Widoro	4	-	1	-	1
20.	Semanten	7	-	1	-	1
21.	Banjarsari	3	-	1	-	1
22.	Bolosingo	4	-	1	-	1
23.	Sambong	12	-	1	-	1
24.	Ponggok	8	-	1	-	1
25	Tambakrejo	3	-	1	-	1
Jumlah		127	15	10	3	22

Sumber: Badan Pusat Statistik 2009

Kelurahan Sidoharjo terletak di wilayah tepi pantai / pesisir dan merupakan dataran rendah. Sehingga Kelurahan Sidoharjo mempunyai potensi perikanan yang cukup menjanjikan.

Secara geografis, batas – batas wilayah Kelurahan Sidoharjo adalah :

Sebelah Utara :Kelurahan Bangunsari dan Kelurahan Pucangsewu

Sebelah Selatan :Samudera Indonesia

Sebelah Timur :Kelurahan Baleharjo dan Kelurahan Ploso

Sebelah Barat :Desa Dadapan

Lebih jelasnya untuk mengetahui lokasi penelitian Skripsi dapat dilihat pada peta Kabupaten Pacitan Lampiran 2.

4.1.2.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Pacitan

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan (2009), Jumlah total penduduk Kecamatan Pacitan Tahun 2008 adalah 66.415 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 32.207 orang dan perempuan sebanyak 34.208 orang. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pacitan dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pacitan

Tahun	Jumlah
2007	65.330 orang
2008	66.415 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik 2009

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Pacitan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 jumlah penduduk di Kecamatan Pacitan sebesar 65.330 orang sedangkan pada tahun 2008 sebesar 66.415 orang. Laju pertumbuhannya yaitu 1,085 jiwa atau 1,66 %

Berdasarkan profil kelurahan Sidoharjo 2009, penduduk Kelurahan Sidoharjo mayoritas berpendidikan tinggi. Terdapat 37 orang lulusan S2 / sederajat. Penduduk Kelurahan Sidoharjo berdasarkan usia dan tingkat pendidikan tercantum dalam Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kelurahan Sidoharjo Berdasarkan Usia dan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK	189
2.	Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK / *playgroup*	166
3.	Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah	-
4.	Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	456
5.	Usia 18 – 56 tahun yang tidak pernah sekolah	248
6.	Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	240
7.	Tamat SD / sederajat	324
8.	Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	229
9.	Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTA	281
10.	Tamat SLTP / sederajat	286
11.	Tamat SLTA / sederajat	478
12.	Tamar D-1 / sederajat	135
13.	Tamat D-2 / sederajat	45
14.	Tamat D-3 / sederajat	38
15.	Tamat S-1 / sederajat	32
16.	Tamat S-2 / sederajat	37
17.	Tamat S-3 / sederajat	25
18.	Tamat SLB A	4
Jumlah Total		

Sumber: Profil Kelurahan Sidoharjo 2009

Potensi perikanan yang terdapat di Kelurahan Sidoharjo mempunyai potensi perikanan yang sangat tinggi. Karena secara geografis Kelurahan ini terdapat di tepi pantai atau daerah pesisir. Hasil perikanan yang terdapat di Kelurahan Sidoharjo adalah Ikan Tuna, Ikan Salmon, Ikan Tongkol atau Ikan Cakalang, dan lain – lain. Untuk pemasaran hasil perikanan di Kelurahan Sidoharjo adalah di jual langsung ke konsumen, ke pasar, melalui KUD dan melalui tengkulak.

4.1.2.3 Kelembagaan

Segala kegiatan penangkapan di Pacitan ini dibawahi dan diatur oleh beberapa lembaga formal, antara lain :

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan

Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang mana dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan merupakan pelabuhan perikanan yang ada di Kabupaten Pacitan. UPPPP Tamperan diresmikan tanggal 29 Desembar 2007 oleh Presiden RI Jendral (Purn) Susilo Bambang Yudoyono di PPP Tamperan Pacitan. Kondisi UPPPP Tamperan Kabupaten Pacitan saat ini telah operasional dengan jumlah fasilitas yang tersedia di PPP Tamperan dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Penanganan operasional PPP Tamperan sendiri pada bulan April 2008 di kelola oleh Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai dan pada 17 April 2010 penanganan operasional dikelola Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor : 061 / / 116.1 / 2010 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan, maka Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan adalah sebagai lembaga / Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
2. Tugas pokok Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan adalah melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan mempunyai fungsi:
   - Pengumpulan dan penyiapan bahan serta perumusan rencana pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.
   - Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran.
   - Penyusunan rencana program penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta pengujian penerapan standar penangkapan ikan.
   - Penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan pelayanan teknis kapal perikan pantai.
   - Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, analisa terhadap pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
   - Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan pantai
   - Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana/ prasarana serta pelayanan teknis kapal perikanan.
   - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pelelangan ikan di Kabupaten Pacitan berdiri mulai tahun 1980 dengan nama Tempat Pelelangan Ikan Tamperan. Dasar penyelenggaraan pelelangan ikan adalah Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan di Jawa Timur. Dasar penyelenggaraan pelelangan ikan di Kabupaten Pacitan telah mengalami perubahan yaitu:

- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan di Jawa Timur.

- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 1988 tentang perubahan pertama peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 1975.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 14 tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Jawa Timur.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 5 tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Tempat Pelelangan Ikan Tamperan yaitu tempat pelelangan ikan di Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo yang sudah ada sejak tahun 2003 kemudian pada tahun 2007 dibangun TPI baru hal dikarenakan adanya pembangunan pelabuhan dengan status PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) di Tamperan, jadi PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Tamperan terdapat dua TPI yang baru berfungsi dan yang lama tidak berfungsi. PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Tamperan diresmikan secara operasional sejak tanggal 29 Desember 2007. Tempat pelelangan ikan di Tamperan yang baru berfungsi dengan baik walau tidak dapat melaksanakan pelelangan secara murni. Aktifitas bongkar muat terlihat di tempat pendaratan ikan dan transaksi jual beli terlihat di gedung tempat pelelangan ikan yang baru. TPI Tamperan yang baru melayani timbangan selama 24 jam yang dilakukan oleh petugas TPI Tamperan dengan cara sistem shift atau bergantian jaga. Hal ini untuk memaksimalkan kinerja dari TPI Tamperan dalam proses penimbangan untuk kapal-kapal yang datang untuk bongkar muat ikan pada malam hari atau kapanpun di TPI Tamperan.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan

Dinas ini bertempat di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dimana setiap bulan mengadakan penyuluhan kepada para nelayan. Dalam pertemuan

tersebut nelayan menanyakan masalah yang dihadapi nelayan kepada petugas penyuluh. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan memiliki tugas:

1. melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi perikanan serta kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan petani ikan.
2. melaksanakan upaya dan membina kelestarian sumberhayati perikanan.
3. membimbing dan membantu pertumbuhan koperasi perikanan serta penyempurnaan tata niaga / pemasaran hasil perikanan.
4. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian perijinan bagi para pengusaha perikanan.

4.1.2.4 Potensi PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Berdasarkan data yang didapatkan di lapang pada waktu penelitian, potensi PPP Mayangan dengan PPP Tamperan sangat berbeda. Hal ini disebabkan oleh letak lokasi PPP Mayangan dengan PPP Tamperan yang berbeda secara geografis, lokasi perairan, daerah penangkapan, hasil tangkapan, jumlah nelayan, armada yang digunakan.

Secara geografis letak PPP Mayangan dengan PPP Tamperan sudah dibahas pada sub bab sebelumnya, oleh karena itu dengan perbedaan geografis tersebut lokasi perairan untuk PPP Mayangan dengan PPP Tamperan juga berbeda. PPP Mayangan terletak pada lokasi perairan pantai utara daerah Kota Probolinggo atau pada wilayah perairan perikanan (WPP RI 712) yaitu Laut Jawa yang mana daerah penangkapan yang dilakukan oleh nelayan Probolinggo meliputi daerah penangkapan sekitar Selat Madura. Hasil tangkapan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2009 adalah 7.272.048,30 Kg dengan nilai Rp. 256.861.582,00 untuk lebih jelasnya data ikan yang ditangkap selama 1 tahun terakhir pada tahun 2009 tersaji pada Lampiran

12. Untuk melengkapi data potensi perikanan di PPP Mayangan yang lainnya yang meliputi jenis armada yang digunakan untuk beroperasi oleh nelayan setempat, jumlah nelayan serta jenis alat tangkap yang digunakan dapat di lihat pada Lampiran 14, 15, dan 16. Daerah pemasaran hasil perikanan meliputi daerah – daerah sekitar Probolinggo diantaranya adalah Pasuruan, Situbondo, Lumajang, Jember, Surabaya. Hal ini dikarenakan Kota Probolinggo merupakan daerah transit untuk menuju ke daerah – daerah yang disebutkan di atas. Sebagai kota yang memiliki jarak transportasi yang mudah untuk menuju Surabaya yang sebagai Ibu Kota Jawa Timur, membuat pemasaran hasil perikanan cepat tertangani.

Potensi perikanan di PPP Tamperan meliputi daerah lokasi PPP Tamperan yang mana terletak di perairan Wilayah Selatan Jawa yaitu daerah Samudera Hindia, di teluk Kabupaten Pacitan yang berbatasan langsung dengan daerah Jawa Tengah. Dengan daerah penangkapan yang dilakukan di Samudera Hindia, serta daerah – daerah perairan sekitar Pacitan, hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di TPI PPP Tamperan dapat di lihat pada Lampiran 13. Hasil perikanan di PPP Tamperan biasanya dipasarkan ke daerah Jakarta, Surabaya, Bali dan daerah sekitar Kabupaten Pacitan. Pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Pacitan untuk saat ini terhambat dengan keadaan lokasi Pacitan yang jauh dari daerah penjualan. Oleh karena itu diharapkan di Pacitan nantinya dapat memilik fasilitas yang lebih memadai untuk memudahkan proses pemasaran hasil perikanan. Potensi hasil perikanan tangkap yang masih utama di PPP Tamperan adalah tuna (*Thunnus spp.*). Hal yang dapat menunjang pengembangan pembangunan dalam bidang perikanan tangkap di kabupaten Pacitan, maka perlu diketahui sumberdaya yang penting dan pengelolaan manajemen yang baik di bidang perikanan. Untuk hal ini PPP Tamperan memiliki data penunjang pengembangan pembangunan dan pengelolaan PPP Tamperan

yang meliputi jumlah nelayan yang ada di PPP Tamperan, jenis armada penangkapan, dan jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di PPP tamperan dan data ini tersaji pada Lampiran 14, 15 dan 16.

4.1.3 Struktur Organisasi

4.1.3.1 Struktur Organisasi UPPPP Mayangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor : 061.1/1137/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Mayangan Kota Probolinggo yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Lebih jelasnya mengenai struktur organisasi UPPPP Mayangan dapat di lihat pada Gambar 2 di bawah ini:

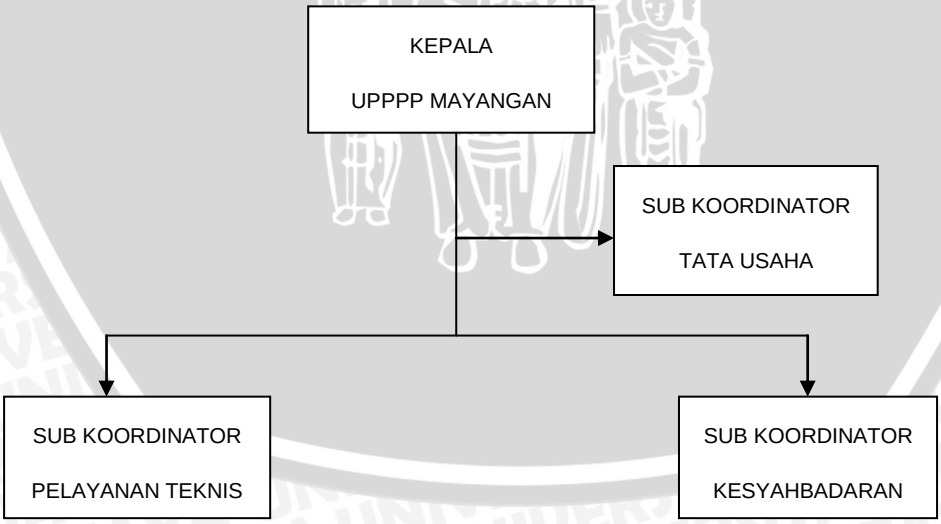

Gambar 2. Struktur Organisasi UPPPP Mayangan Kota Probolinggo

Susunan Organisasi UPPPP Mayangan Kota Probolinggo terdiri atas :

a. Koordinator Balai
b. Sub Koordinator Tata Usaha
c. Sub Koordinator Pelayanan Teknis
d. Sub Koordinator Kesyabandaran

4.1.3.2 Struktur Organisasi UPPPP Tamperan

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor : 061 / / 116.1 / 2010 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan. Lebih jelasnya mengenai struktur organisasi UPPPP Tamperan dapat di lihat pada Gambar 3 di bawah ini:

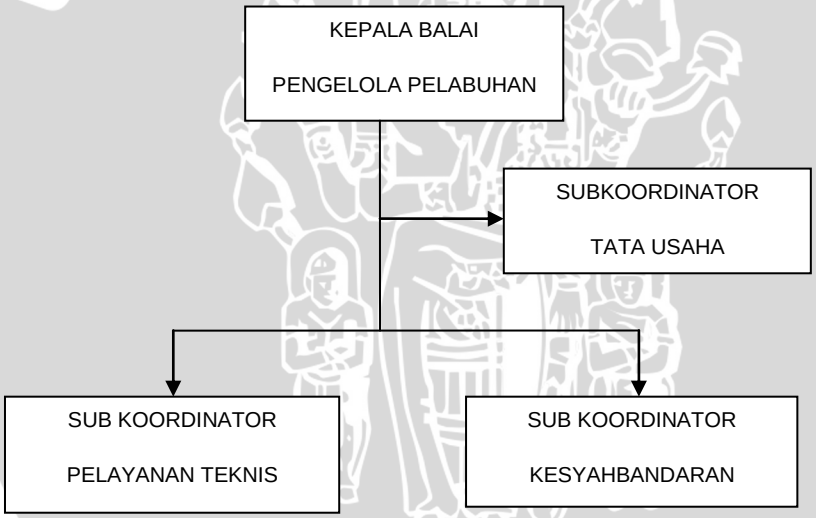

Gambar 3. Struktur Organisasi UPPPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan adalah sebagai berikut :

1) Kepala balai, mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi tugas – tugas pelabuhan.
2) Sub Koordinator Tata Usaha, mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelabuhan.

1) Sub Koordinator Pelayanan Teknis, mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan dan pelayanan jasa serta pemeliharaannya.
- Melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan penyelenggaraan kemanan serta koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan.
- Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan.
- Menyusun penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan.
- Melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan jasa pelabuhan perikanan.
- Melaksanakan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan teknis.
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

2) Sub Koordinator Kesyahbandaran, mempunyai tugas :

- Melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran;
- Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran;
- Melaksanakan pelayanan keselamatan pelayaran;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan keselamatan pelayaran;
- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data kesyahbandaran;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelabuhan

Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP) Tamperan dilaksanakan oleh seorang Kepala Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai dibantu oleh 5 orang pegawai / karyawan. Sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka jumlah tenaga kerja yang ada di Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan masih sangatlah kurang. Adapun kekurangan tersebut adalah Kepala Bagian Tata Usaha serta Kepala Bagian Kesyahbandaran. Untuk mendukung kegiatan operasional di UPPPP Tamperan, pada tahun 2008 mendapatkan anggaran pembangunan dari sumber dana DAK dan APBD Propins Jawa Timur. Dana tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Kabupaten Pacitan.

4.2 Studi Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

4.2.1 PPP Mayangan

Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan adalah PPP baru yang berlokasi di daerah Kota Probolinggo, yang pembangunannya untuk menampung dan melayani aktifitas perekonomian perikanan yang dilakukan oleh nelayan pendatang maupun nelayan Kota Probolinggo. Pembangunan PPP Mayangan dimulai pada tahun 2000 dan diresmikan pada tanggal 29 Desember 2007 oleh Presiden RI Jend (Purn) Susilo Bambang Yudoyono di PPP Tamperan Kabupaten Pacitan. Ketersediaan fasilitas PPP Mayangan meliputi ketersedian fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

4.2.1.1 Fasilitas Pokok PPP Mayangan

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal. Adapun penjelasan tentang ketersediaan fasilitas pokok PPP Mayangan tersaji pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Fasiltas Pokok PPP Mayangan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah/Volume
	Fasilitas Pokok	
1.	*Breakwater*	P= 925 m, L= 8 m
2.	*Revetment*	P= 700 m, L= 8 m
3.	Dermaga	P= 700 m, L= 9 m
4.	Alur Pelayaran	P= 700 m, L= 8 m
5.	Kolam Pelabuhan	Luas= 20.000 m^2 L= 150 m
6.	Jalan	P= 1.000 m, L= 8 m

Sumber: http://www.pipp.dkp.go.id 2010

Data Tabel 8 di atas didapatkan dari situs Dinas Kelautan dan Perikanan untuk PPP Mayangan. Hasil data tersebut di atas adalah gambaran umum untuk

sementara tentang ketersediaan fasilitas pokok dan kondisi fasilitas pokok di PPP Tamperan.

Perkembangan pembangunan fasilitas pokok dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 di PPP Mayangan dapat di lihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pokok PPP Mayangan

No	Jenis fasilitas	Rencana Dibangun	Dibangun s/d tahun 2004	Dibangun s/d tahun 2007	Dibangun s/d tahun 2008	Dibangun s/d tahun 2009	Dibangun s/d tahun 2010
I	**Fasilitas Pokok**						
1	Lahan PPP	20 HA	13 HA	20 HA	20 HA	20 HA	20 HA
2	Breakwater - Sisi Timur - Sisi Barat	 925 M 597 M	 862 M 300 M	 925 M 325 M	 925 M 597 M	 925 M 597 M	 925 M 597 M
3	Dermaga Landing Beach	400 M	350 M	400 M	400 M	400 M	400 M
4	Dermaga Pier	75 M	50 M	75 M	75 M	75 M	75 M
5	Kolam Labuh	20 HA	20 HA	20 HA	20 HA	20 HA	20 HA
6	Cousway	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
7	Revetment	700 M	700 M	700 M	700 M	700 M	700 M

Sumber: Data UPPPP Mayangan 2010

Data di atas mendiskripsikan perkembangan pembangunan fasilitas pokok PPP Mayangan, adapun penilaian ketersediaan menurut data hasil survey penelitian pada waktu penelitian mengenai ketersediaan fasilitas pokok di PPP Mayangan adalah sebagai berikut dilihat dari 11 parameter fasilitas pokok berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan maka di bawah ini adalah Tabel 10 penilaian ketersediaan fasilitas pokok PPP Mayangan.

Tabel 10. Penilaian ketersediaan fasilitas pokok PPP Mayangan

Fasilitas Pokok PPP Mayangan			
Unit	**Ketersediaan fasilitas**	**Aktivitas**	**Keterangan**
Pemecah Gelombang/ Breakwater	1	v	ada, kondisi baik
Revetment (turap penahan tanah)	1	v	ada, kondisi baik
Groin	1	v	ada, kondisi baik
Dermaga	1	v	ada, kondisi baik
Jetty	1	v	ada, kondisi baik
Kolam Pelabuhan	1	v	ada, kondisi baik
Alur pelayaran	1	v	ada, kondisi baik
Jalan	1	v	ada, kondisi baik
Drainase	1	v	ada, kondisi baik atau lancar
Gorong-gorong	1	v	ada, kondisi kurang terawat
Lahan	1	v	ada
Jumlah	11		

Sumber: Data hasil survey lapang dan data UPPPP Mayangan 2010

Fasilitas pokok di PPP Mayangan dari hasil survey penelitian dengan dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 telah tersedia sepenuhnya. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas pokok di PPP Mayangan secara ketersediaan sesuai dengan PER.16/MEN/2006 dan KEP.10/MEN/2004 tentang pelabuhan perikanan di bawah ini tersedia Tabel 11 persentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Mayangan.

Tabel 11. Persentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Mayangan

Fasiltas Pokok		Persen
ada	11	100.00
tidak ada	0	-

Data hasil persentase ketersediaan fasilitas pokok di atas adalah 100 persen yang menandakan bahwa fasilitas pokok di PPP Mayangan telah tersedia sepenuhnya sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Fasilitas pokok di PPP

Mayangan dapat dijelaskan sebagai berikut dan beberapa fasilitas pokok tergambar pada Gambar 4 sampai dengan Gambar 13 seperti di bawah ini.

1. *Breakwater*

   Fungsi *breakwater* selain sebagai pelindung terhadap gelombang, juga sebagai kontruksi penahan sedimentasi. Konstruksi *breakwater* berupa batu tumpukan atau disebut juga *caison*. *Breakwater* ini mempunyai panjang 925 m pada sisi timur, dan panjang 597m pada sisi barat dan lebar 8 m, berada pada sisi barat dan timur.

2. *Revetment*

   Revetment merupakan bangunan yang berfungsi untuk menahan tanah agar tidak longsor dan juga berfungsi sebagai penahan gelombang. *Revetment* yang ada di UPPPP Mayangan mempunyai panjang 700 m dan lebar 8 m. Biasanya dipergunakan sebagai alternatif jalan untuk menuju ke breakwater oleh para pemakai pelabuhan (nelayan, petugas PPP Mayangan, masyrakat).

3. Groin

   Groin adalah fasilitas yang berfungsi sebagai lahan penampung endapan sedimentasi pasir atau bahan material lain yang terbawa oleh arus laut yang masuk ke kolam pelabuhan. Setelah itu endapan material tersebut dikeruk atau *dreadging* agar tidak mengakibatkan pendangkalan pada kolam pelabuhan dan menghambat proses bongkar muat kapal.

4. Dermaga

   Dermaga adalah suatu bangunan untuk merapatkan dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat ikan. Konstruksi dermaga yang ada di UPPPP Mayangan berupa cor dengan panjang 700 m dan lebar 9 m. Dermaga yang ada sebanyak 2 dermaga yaitu dermaga landing beach dan dermaga pier.

5. *Jetty*

Jetty merupakan failitas pokok seperti jembatan yang menjorok ke kolam pelabuhan, membantu dalam proses bongkar muat perbekalan maupun hasil tangakapan ikan oleh kapal-kapal nelayan di dermaga pelabuhan. *Jetty* di PPP Mayangan ada 3 yang membantu pengoperasian bongkar muat untuk kapal-kapal yang sandar di dermaga dan dengan perbedaan kedalaman kolam pelabuhan sesuai drifting kapal yang sandar.

6. Kolam Pelabuhan

Kolam pelabuhan digunakan sebagai tempat tambat labuh bagi kapal-kapal yang beroperasi di UPPPP Mayangan. Pada saat ini kolam pelabuhan yang ada di UPPPP Mayangan yaitu kolam yang mempunyai kedalaman 2 m pada surut terendah dengan luas 20.000 m^2 dan lebar 150 m. Dengan luas 20.000 m^2 kolam pelabuhan di PPP Mayangan di bangun sesuai kondisi perikanan sekarang yakni dengan jumlah dan ukuran kapal yang ada sekarang, maka kolam Pelabuhan Perikanan Mayangan direncanakan dibagi menjadi 3 jenis kedalaman, yaitu :

- **Kolam 1,** dengan kedalaman -1,2 m LWS, untuk kapal – kapal kecil dengan bobot < 10 ton, dengan luas kolam = 2,90 Ha.
- **Kolam 2,** dengan kedalaman -3,0 m LWS, untuk kapal – kapal sedang dengan bobot < 100 ton, dengan luas kolam = 6,50 Ha.
- **Kolam 3,** dengan kedalaman - 4,0 m LWS, untuk kapal – kapal besar dengan bobot < 300 ton, dengan luas kolam = 10,65 Ha.

7. Alur Pelayaran

Alur pelayaran di UPPPP Mayangan mempunyai kedalaman 5 m pada surut terendah dengan panjang 700 m dan lebar 8 m.

8. Jalan

   Jalan merupakan fasilitas untuk memperlancar distribusi hasil perikanan dan bahan perbekalan maupun bahan-bahan keperluan kapal ikan. Jalan yang ada di UPPPP Mayangan mempunyai panjang 1.000 m dan lebar 8 m. Jalan dalam kondisi sangat baik sehingga kendaraan dapat melewatinya dengan nyaman dan disribusi ikan juga dapat berjalan dengan lancar.

9. Drainase

   Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara natural maupun dibuat oleh manusia, drainase penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. Menurut Suripin (2004) dalam Wapedia (2010) drainase adalah mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase di PPP Mayangan ini didapatkan dari PDAM Kota Probolinggo, karena air tanah di PPP Mayangan yang asin karena dekat dengan laut. Walaupun PPP Mayangan telah mempunyai instalasi air yang dapat mengolah air payau menjadi air tawar tetapi instalasi tersebut masih belum berfungsi secara operasioanal.

10. Gorong-gorong

    Gorong-gorong merupakan saluran air dalam tanah, atau juga bisa disebut dengan sebutan got. Gorong-gorong ini difungsikan untuk fasilitas yang membantu dalam kelancaran penyaluran aliran air bersih maupun

pembuangan air limbah untuk di olah ke Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan PPP Mayangan.

11. Lahan

Lahan merupakan fasilitas penting pada pengembangan PPP Mayangan,, dengan adanya lahan 20 Ha maka PPP Mayangan telah dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pokok dengan menyuluruh sesuai PER.16/MEN/2006 dan KEP.10/MEN/2004 tentang pelabuhan perikanan yang menyebutkan bahwa lahan untuk Pelabuhan Perikanan Pantai atau Pelabuhan Perikanan golongan C di harapkan memiliki lahan 5 Ha sampai dengan 15 Ha dan lahan PPP Mayangan sendri telah meliki lahan lebih dari 5 Ha sesuai dari ketentuan dasar PER.16/MEN/2006 dan KEP.10/MEN/2004 tentang pelabuhan perikanan. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 4 sampai Gambar 13 tentang beberapa fasilitas pokok di PPP Mayangan.

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 4. PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 5. Kondisi jalan PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 6. *Breakwater* PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 7. *Breakwater* PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 8. *Jetty* PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 9. Kolam pelabuhan PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 10. Dermaga PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 11. *Revetment* PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 12. Lahan PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 13. Drainase dan Gorong-gorong PPP Mayangan Kota Probolinggo

4.2.1.2 Fasilitas Fungsional PPP Mayangan

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. Fasilitas fungsional terdiri dari fasilitas yang dapat diusahakan dan fasilitas yang tidak dapat diusahakan, masing-masing memiliki kriteria sendiri-sendiri. Fasilitas fungsional yang tersedia di PPP Mayangan dapat di lihat pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Fasiltas Fungsional PPP Mayangan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah/Volume
	Fasilitas Fungsional	
1	Rambu Pelayaran	1 unit
2	Lampu Suar	2 unit
3	PDAM	Debit 5 m^2/detik
4	Mesin Genset	1 unit
5	SPDN	1 unit
6	TPI	400 m^2
7	IPAL	100 m^2

Sumber: http://www.pipp.dkp.go.id 2010

Perkembangan pembangunan fasilitas fungsional dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 di PPP Mayangan dapat di lihat pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Perkembangan Pembangunan Fasilitas Fungsioanal PPP Mayangan

No	Jenis fasilitas	Rencana Dibangun	Dibangun s/d tahun 2004	Dibangun s/d tahun 2007	Dibangun s/d tahun 2008	Dibangun s/d tahun 2009	Dibangun s/d tahun 2010
II	**Fasilitas Fungsional**						
1	Gedung TPI	1.200 M^2	500 M^2	1.200 M^2	1.200 M^2	1.200 M^2	1.200 M^2
2	Pabrik Es	30 Ton	–	–	–	–	–
3	Kantor Pelabuhan	360 M^2	–	–	–	–	360 M^2
4	Kantor keamanan terpadu	36 M^2	36 M^2	36 M^2	36 M^2	36 M^2	36 M^2
5	Ground Resevoir	20 M^3	–	20 M^3	20 M^3	20 M^3	20 M^3
6	Power House	20 M^2	_	20 M^2	20 M^2	20 M^2	20 M^2
7	Menara air	10 M^3	10 M^3	10 M^3	10 M^3	10 M^3	10 M^3

8	Bengkel	300 M^2	_	_	_	_	_
9	SPDN	8 Ton	8 Ton	8 Ton	8 Ton	8 Ton	8 Ton
10	Gudang Es dan Garam	300 M^2	_	_	_	_	_
11	Slipway	1 unit	_	_	_	_	_
12	IPAL	1 unit	_	_	_	1 unit	1 unit
13	Transit sheed	5 unit	_	_	_	3 unit	3 unit

Sumber: Data UPPPP Mayangan 2010

Data Tabel 13 di atas menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan fasilitas fungsional di PPP Mayangan masih belum sesuai rencana pembangunan yang ditentukan sampai pada saat penelitian berlangsung. Selama penelitian berlangsung kondisi PPP Mayangan dalam tahap pembangunan untuk fasilitas-fasilitas yanga belum terpenuhi. Pembangunan fasilitas tersebut juga meliputi pembangunan fasilitas fungsional seperti pembangunan pagar kantor TPI, pembangunan IPAL, pembangunan Kantor administrasi yang baru. Kantor administrasi di PPP Mayangan selama ini menempati kantor sementara yanga mana kantor tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kantor keamanan laut terpadu (KAMLADU). Sedangkan KAMLADU sendiri sementara ini menempati kantor TPI lama. Kantor swasta lain adalah kantor koperasi yang berlokasi di luar pelabuhan. Pembangunan fasilitas fungsional lainnya masih belum ada karena terhambatnya dana pembangunan dari pemerintah yang terkait dengan pembangunan PPP Mayangan.

Hasil survey pada penelitian tentang fasilitas fungsional serta kondisinya menurut dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 dengan penilaian ketersediaan dari 22 parameter yang diujikan maka dapat di lihat pada Tabel 14 yang tersaji di bawah ini.

Tabel 14. Penilaian ketersediaan fasilitas fungsional PPP Mayangan

Fasilitas Fungsional PPP Mayangan			
Unit	Ketersediaan fasilitas	Aktivitas	Keterangan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	v	ada, kondisi baik
Pasar Ikan	1	v	ada, kondisi baik
Telepon	1	v	ada, kondisi baik
Internet	1	v	ada, kondisi baik
SSB(*Single Side Band*)	1	x	ada, kondisi rusak
Rambu-rambu	1	v	ada, kondisi baik
Lampu suar	1	v	ada, kondisi baik
Menara pengawas	0	x	tidak ada
Air bersih	1	v	ada
Es	1	v	ada
Listrik	1	v	ada
Bahan bakar	1	v	ada
Dock/slipway	0	x	tidak ada
Bengkel	0	x	tidak ada
Tempat perbaikan jaring	1	v	ada
Transit sheed	1	v	ada
Laboratorium	0	x	tidak ada
Kantor administrasi pelabuhan	1	v	ada
Kantor swasta lainnya	1	v	ada
Alat-alat angkut ikan	1	v	ada
Alat-alat angkut es	1	v	ada
IPAL	1	x	ada, belum berfungsi
Jumlah	18		

Sumber: Data hasil survey lapang dan data UPPPP Mayangan 2010

Fasilitas fungsional di PPP Mayangan secara ketersediaan hanya tersedia 18 fasilitas dari yang seharusnya tersedia 22 fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004. Lebih jelasnya untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas fungsional sesuai data persentase adalah seperti Tabel 15 yang tersaji di bawah ini.

Tabel 15. Persentase ketersediaan fasilitas fungsional PPP Mayangan

Fasiltas Fungsional		Persen
ada	18	81.82
tidak ada	4	18.18

Data Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa hasil persentase ketersediaan fasilitas fungsional PPP Mayangan adalah 81.82% dari 100% fasilitas fungsional yang sesuai dengan dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004. Berikut di bawah ini adalah Gambar 14 mengenai diagram pie presentase ketersediaan fasilitas fungsional PPP Mayangan.

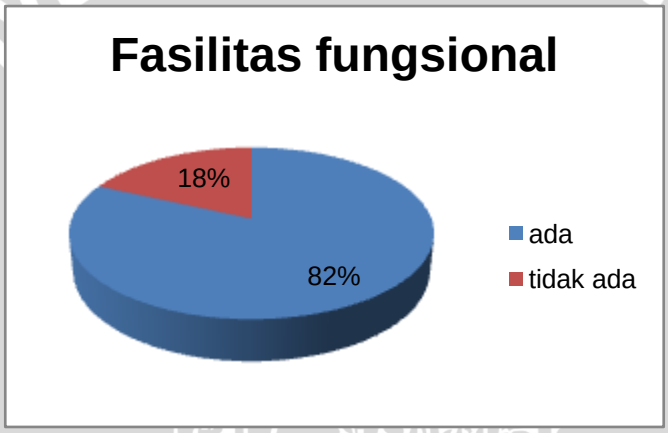

Gambar 14. Presentase ketersediaan fasilitas fungsional (Oktober 2010)

Fasilitas fungsional PPP Mayangan yang tersedia secara lebih jelasnya sesuai ketersediaan dan kondisinya dapat dijelaskan di bawah ini beserta beberapa fasilitas fungsional di PPP Mayangan yang tergambar pada Gambar 15 sampai dengan Gambar 24.

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

   TPI sangat bermanfaat bagi nelayan untuk memudahkan proses pelelangan agar berjalan dengan baik dan terkoordinir sehingga penanganan ikan dapat dilakukan dengan cepat mengingat sifat ikan yang mudah rusak/busuk. Akan tetapi di UPPPP Mayangan pelelangan belum berjalan sehingga TPI hanya digunakan sebagai tempat

penimbangan ikan hasil tangkapan dan transaksi dengan bakul. TPI di UPPPP Mayangan seluas 400 m^2 dan dalam kondisi baik.

2. Pasar ikan

   Pasar ikan adalah tempat untuk melakukan traksaksi jual beli ikan antara penjual dan pembeli. Pasar ikan yang ada di PPP Mayangan masih belum permanen, masih terbuat dari bambu dan beratap asbes dan beralas tanah. Sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk dipergunakan secara layak apabila terjadi hujan.

3. Rambu Pelayaran

   Rambu pelayaran digunakan sebagai pandu pada saat kapal akan masuk ke pelabuhan dan bersandar. Rambu pelayaran di UPPPP Mayangan ada 1 unit dan dalam kondisi baik.

4. Lampu suar

   Lampu suar merupakan bangunan menara yang cahayanya dipancarkan untuk membantu navigasi kapal laut. Lampu suar yang ada di UPPPP Mayangan ada 2 unit dalan kondisi baik.

5. PDAM

   Fasilitas PDAM di UPPPP Mayangan memberikan pelayanan penyaluran air tawar dengan debit 5 m^2/detik. Air PDAM ini dipergunakan untuk kebutuhan semua pengguna atau pemakai fasilitas pelabuhan.

6. Mesin Genset

   Mesin genset yang dimiliki UPPPP Mayangan ini sebanyak 1 unit dan mempunyai daya total sebesar 50 kVA. Mesin genset ini digunakan memenuhi kebutuhan listrik di UPPPP Mayangan. Selain dengan genset di PPP Mayangan juga memakai listrik PLN untuk semua kebutuhan di pelabuhan.

7. SPDN

   SPDN merupakan singkatan dari *Solar Package Dealer Nelayan*. SPDN yang berada di area pelabuhan dapat memudahkan nelayan untuk memperoleh bahan bakar berupa solar sebagai bahan bakar utama yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. Nelayan dapat membeli solar dengan harga subsidi dari pemerintah yaitu Rp.4.500/liter. SPDN di UPPPP Mayangan sebanyak 1 unit dengan kapasitas 10.000 liter/hari. SPDN di UPPP Mayangan hanya melayani pengisian bahan bakar untuk kapal yang berkapasitas di bawah 30 GT, untuk kapal dengan daya muat di atas 30 GT pembeliaan bahan bakar pesan langsung ke SPBU pusat Surabaya dengan harga Rp. 6.500/liter.

8. Tempat perbaikan jaring

   Tempat perbaikan jaring di PPP Mayangan sebenarnya dilakukan di daerah pinggir dermaga pelabuhan, dan tidak jarang para nelayan juga melakukan perbaikan jaring di Transit Sheed yang belum terpakai. PPP Mayangan sebenarnya memiliki gudang bahan alat penangkapan, tetapi gudang tersebut masih dalam pembangunan dan lokasinya jauh dari dermaga dekat dengan TPS dan pasar ikan.

9. Transit Sheed

   Transit Sheed adalah tempat untuk menampung hasil tangkapan ikan dari kapal yang baru datang beoperasi dan ingin melakukan pendaratan serta bongkar muat dan antre untuk melakukan penimbangan di TPI Mayangan. Transit Sheed yang terpakai di PPP Mayangan saat ini masih yang di depan TPI, Transit Sheed yang lain belum terpakai dikarenakan semua kapal masih belum bersandar semua di kolam pelabuhan PPP Mayangan melainkan masih parkir di Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo.

10. Kantor Administrasi Pelabuhan

    Kantor adsministrasi pelabuhan adalah kantor yang menangani administrasi mengenai semua persoalan di pelabuhan, mulai dari administrasi pelabuhan, jasa, serta pengembangan pelabuhan dan kesejahteraan nelayan.

11. Kantor swasta lainnya

    Kantor swasta lainnya yang dimaksud adalah kantor koperasi yang membantu dalam perekonomian nelayan dan proses penjualan ikan dengan kerjasama kepada para penjual ikan atau pemilik kapal. Letak koperasi ini masih berada di luar dari PPP Mayangan.

12. Alat-alat angkut ikan

    Alat–alat angkut ikan adalah alat untuk memudahkan mengangkut ikan dari kapal ke dermaga atau ketempat penimbangan yang terbuat dari fiber, plastik, keranjang basket dari bambu. Alat-alat angkut ikan yang tersedia di PPP Mayangan disediakan dan di kelola oleh TPI Mayangan.

13. Alat-alat angkut es

    Alat-alat angkut es di PPP Mayangan biasanya para nelayan dan pedagang ikan mengankut es dengan basket fiber atau dengan bantuan becak, pick up, atau truck. Nelayan di Probolinggo dibedakan nelayan ngebok dan nelayan harian. Hal ini karena ikan di laut probolinggo sudah berkurang. Oleh karena itu nelayan harian biasanya tidak membawa es untuk operasi penangkapan, es dibutuhkan pada saat mereka tiba di pelabuhan. Yang biasanya mebawa es adalah nelayan ngebok dan biasanya membutuhkan es untuk selama ngetrip sebanyak 15-60 balok es, sedangkan harian hanya mebutuhkan es sebanyak 2-3 balok es saja. Dengan harga 1 balok es untuk kapal adalah Rp. 8.000/balok dan untuk pedagang ikan harga 1 balok es adalah Rp. 8.500/balok. Untuk kapal

balai atau kapal yang memiliki kapasitas di atas 30 GT dan melakukan operasi penangkapan kurang lebih 6 bulan biasanya membutuhkan es balok sebanyak 250 balok.

14. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

IPAL merupakan instalasi yang digunakan untuk mengolah limbah cair yang merupakan air buangan yang ada di UPPPP Mayangan dimana limbah tersebut diproses melalui 4 tahapan, antara lain proses *anaerobic, aerobic*, *filtrasi*, dan yang terakhir proses *chlorinasi*. Air limbah yang telah diolah oleh IPAL nantinya dibuang lagi ke laut. IPAL yang ada di UPPPP Mayangan seluas 100 m^2 dengan kapasitas air 10 ton/hari. Pada saat penelitian IPAL masih dalam keadaan diperbaiki dan belum terpakai sebagai mana mestinya. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 15 sampai Gambar 24 tentang beberapa fasilitas fungsional di PPP Mayangan.

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 15. TPI PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 16. Pasar ikan PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 17. Transhit Sheed PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 18. KAMLADU PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 19. SPDN PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 20. Kantor UPPP Mayangan lama dan baru PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 21. Menara air dan Power House PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 22. Desilinasi PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 23. Gudang BAP dan aktifitas perbaikan jarring oleh nelayan di PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 24. IPAL di PPP Mayangan Kota Probolinggo

4.2.1.3 Fasilitas Penunjang PPP Mayangan

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas penunjang yang tersedia di PPP Mayangan dapat di lihat pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16. Fasiltas Penunjang PPP Mayangan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah/Volume
	Fasilitas Penunjang	
1	Pos Jaga	1 unit
2	MCK	18 m^2
3	Kios nelayan/toko/waserda	28 unit
4	Tempat Parkir	20 m^2

Sumber: http://www.pipp.dkp.go.id 2010

Perkembangan pembangunan fasilitas penunjang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 di PPP Mayangan dapat di lihat pada Tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17. Perkembangan Pembangunan Fasilitas Penunjang PPP Mayangan

No	Jenis fasilitas	Rencana Dibangun	Dibangun s/d tahun 2004	Dibangun s/d tahun 2007	Dibangun s/d tahun 2008	Dibangun s/d tahun 2009	Dibangun s/d tahun 2010
III	**Fasilitas Penunjang**						
1	Gedung Pertemuan nelayan	300 M^2	–	–	–	–	300 M2 dalam tahap pembangunan
2	Pos Jaga	20 M^2	–	–	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik
3	Tempat Peribadatan	100 M^2	–	–	100 M^2	Belum sempurna	Belum sempurna
4	MCK/Toilet	36 M^2	18 M^2	36 M^2	36 M^2	36 M^2	36 M^2
5	Kios	20 unit	–	16 unit	16 unit	16 unit	20 unit
6	TPS	2 unit	–	–	2 unit	2 unit	2 unit
7	Kantin	1 unit	–	–	–	–	–
8	Rumah Dinas	1 unit	–	–	–	1 unit	1 unit
9	kantor Koperasi	1 unit	–	–	–	–	–
10	Tempat parkir	3.000M^2	–	–	3.000 M^2	3.000 M^2	3.000 M^2

Sumber: Data UPPPP Mayangan 2010

Data Tabel 17 di atas menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan fasilitas penunjang di PPP Mayangan masih belum sesuai rencana pembangunan yang ditentukan sampai pada saat penelitian berlangsung. Selama penelitian berlangsung kondisi PPP Mayangan dalam tahap pembangunan untuk fasilitas-fasilitas yanga belum terpenuhi. Pembangunan fasilitas tersebut juga meliputi pembangunan fasilitas penunjang seperti pembangunan gedung pertemuan nelayan yang mana pada saat penelitian berlangsung masih dalam tahap pembangunan, pertemuan nelayan dengan pihak pelabuhan selama operasional PPP Mayangan dilakukan di direksikit yang tersedia di pelabuhan, pembangunan lainnya yaitu pembangunan kios untuk para pedagang, pembangunan rumah dinas atau direksikit. Kantor koperasi di PPP Mayangan masih belum dibangun, dan masih berada di luar PPP Mayangan. Pembangunan fasilitas penunjang lainnya masih belum ada karena terhambatnya dana pembangunan dari pemerintah yang terkait dengan pembangunan PPP Mayangan.

Hasil survey pada penelitian tentang fasilitas penunjang serta kondisinya menurut dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 dengan penilaian ketersediaan dari 10 parameter yang diujikan maka dapat di lihat pada Tabel 18 yang tersaji di bawah ini.

Tabel 18. Penilaian ketersediaan fasilitas penunjang PPP Mayangan

Fasilitas Penunjang PPP Mayangan			
Unit	Ketersediaan fasilitas	Aktivitas	Keterangan
Balai pertemuan nelayan	0	x	tidak ada
Mess Operator	1	v	ada, kondisi baik
Pos jaga	1	v	ada, kondisi baik
Pos pelayanan terpadu	1	v	ada, kondisi baik
Tempat penginapan nelayan	0	x	tidak ada
Tempat peribadatan	1	v	ada, kondisi baik
Mandi cuci kakus (MCK)	1	v	ada, kondisi baik
Guest House	0	x	tidak ada
Kios	1	v	ada, kondisi baik
IPTEK	0	x	tidak ada
Jumlah	6		

Sumber: Data hasil survey lapang dan data UPPPP Mayangan 2010

Fasilitas penunjang di PPP Mayangan secara ketersediaan hanya tersedia 6 fasilitas dari yang seharusnya tersedia 10 fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004. Balai pertemuan nelayan di PPP Mayangan pada saat penelitian berlangsung masih dalam tahap pembangunan yang mana pembangunan balai pertemuan nelayan ini dibangun bersamaan dengan pembangunan kantor administrasi pelabuhan yang baru, akan tetapi pertemuan nelayan sebelumnya dilaksanakan di salah satu sarana pelabuhan yang disebut direksikit. Lebih jelasnya untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas penunjang sesuai data persentase adalah seperti Tabel 19 yang tersaji di bawah ini.

Tabel 19. Persentase ketersediaan fasilitas penunjang PPP Mayangan

Fasiltas Penunjang		Persen
ada	6	60
tidak ada	4	40

Data Tabel 19 di atas menunjukkan bahwa hasil persentase ketersediaan fasilitas penunjang PPP Mayangan adalah 60% dari 100% fasilitas penunjang yang sesuai dengan dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004. Berikut di bawah ini adalah Gambar 25 mengenai diagram pie presentase ketersediaan fasilitas penunjang PPP Mayangan.

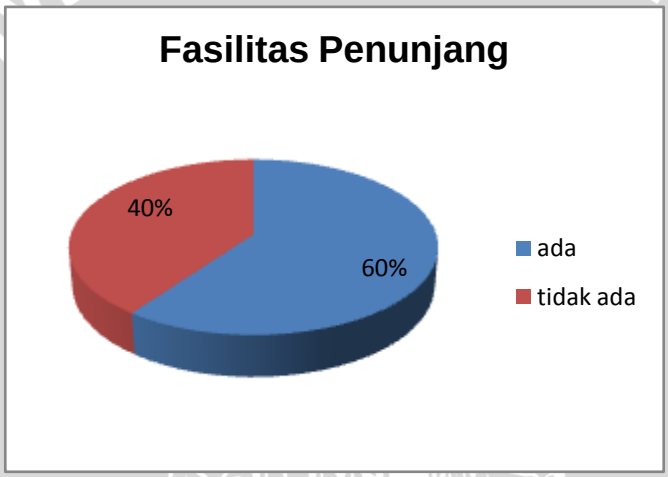

Gambar 25. Presentase ketersediaan fasilitas penunjang (Oktober 2010)

Fasilitas penunjang PPP Mayangan yang tersedia secara lebih jelasnya sesuai ketersediaan dan kondisinya dapat di jelaskan di bawah ini beserta beberapa fasilitas penunjang di PPP Mayangan yang tergambar pada Gambar 26 sampai dengan Gambar 31.

1. Mess operator

   Mess operator adalah fasilitas penunjang yang diperuntukkan untuk memantau atau mengoperasikan power house di pelabuhan.

2. Pos Jaga

   Pos jaga di UPPPP Mayangan disebut juga POS KAMLADU, yaitu singkatan dari Pos Keamanan Laut Terpadu. Pos ini terletak di sebelah barat TPI dengan luas bangunan 9 m^2.

3. Pos pelayanan terpadu

   Pos pelayanan terpadu adalah pos untuk pengawasan keamanan di pelabuhan, dan pos pelayanan terpadu ini untuk sementara jadi satu dengan kantor KAMLADU di PPP Mayangan.

4. Tempat peribadatan

   Tempat peribadatan di PPP Mayangan adalah satu moshola yang pembangunannya masih belum selesai, namun sudah terpakai atau dipergunakan oleh para nelayan, pegawai pelabuhan, dan para pedagang serta pengujung atau pembeli ikan. Ukuran mushola di PPP Mayangan tidak terlalu besar dan dapat menampung jumlah jamaah sebanyak kurang lebih di atas 40 orang jamaah.

5. Mandi Cuci Kakus (MCK)

   MCK sangat dibutuhkan bagi pengguna pelabuhan. Meskipun termasuk dalam fasilitas penunjang, tetapi MCK harus ada. DI UPPPP Mayangan, MCK dibangun seluas 18 m^2.

6. Tempat Parkir

   Fasilitas tempat parkir ini digunakan untuk memarkir kendaraan baik yang dimiliki oleh bakul-bakul maupun pengunjung. Tempat parkir yang ada di UPPPP Mayangan seluas 20 m^2.

7. Kios Nelayan/Toko/Waserda

   Dengan adanya aktifitas yang dilakukan di pelabuhan, mendorong masyarakat untuk membuka usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraktifitas di pelabuhan tersebut. Untuk membantu

berjalannya usaha tersebut, maka disewakan kios-kios. Jenis usaha yang dibuka sebagian besar adalah menjual makanan dan minuman. Kios yang disewakan di UPPPP Mayangan sebanyak 28 unit atau seluas 30 m^2. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 26 sampai Gambar 31 tentang beberapa fasilitas penunjang di PPP Mayangan.

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 26. Tempat Pembuangan Sampah di PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 27. Tempat Parkir di PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 28. Pos jaga dan portal masuk di PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 29. Mess operator di PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 30. Mushola dan MCK di PPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 31. Kios di PPP Mayangan Kota Probolinggo

4.2.1.4 Fasilitas keseluruhan PPP Mayangan

Penilaian ketersedian fasilitas di PPP Mayangan secara keseluruhan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang adalah sebuah penilaian yang mana menilai tentang ketersediaan fasilitas tersebut di atas apa sesuai dengan jumlah fasilitas pelabuhan yang ada pada dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 yang diperoleh dari data hasil survey di lapang pada waktu penelitian di PPP Mayangan pada bulan oktober tahun 2010. Data tersebut terlampir pada Tabel 20 di bawah ini beserta Tabel 21 mengenai data presentase ketersediaan fasilitas secara keseluruhan di PPP Mayangan dan Gambar 32 yang tergambar

untuk menggambarkan kondisi persentase keadaan ketersediaan keseluruhan fasilitas pelabuhan yang tersedia di PPP Mayangan.

Tabel 20. Penilaian ketersediaan fasilitas secara keseluruhan di PPP Mayangan

Fasilitas PPP Mayangan			
Unit	**Ketersediaan fasilitas**	**Aktivitas**	**Keterangan**
fasilitas pokok			
Pemecah Gelombang	1	v	ada, kondisi baik
Revetment (turap penahan tanah)	1	v	ada, kondisi baik
Groin	1	v	ada, kondisi baik
Dermaga	1	v	ada, kondisi baik
Jetty	1	v	ada, kondisi baik
Kolam Pelabuhan	1	v	ada, kondisi baik
Alur pelayaran	1	v	ada, kondisi baik
Jalan	1	v	ada, kondisi baik
Drainase	1	v	ada, kondisi baik atau lancar
Gorong-gorong	1	v	ada, kondisi kurang terawat
Lahan	1	v	ada
fasilitas fungsional			
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	v	ada, kondisi baik
Pasar Ikan	1	v	ada, kondisi baik
Telepon	1	v	ada, kondisi baik
Internet	1	v	ada, kondisi baik
SSB(*Single Side Band*)	1	x	ada, kondisi rusak
Rambu-rambu	1	v	ada, kondisi baik
Lampu suar	1	v	ada, kondisi baik
Menara pengawas	0	x	tidak ada
Air bersih	1	v	ada
Es	1	v	ada
Listrik	1	v	ada
Bahan bakar	1	v	ada
Dock/slipway	0	x	tidak ada
Bengkel	0	x	tidak ada
Tempat perbaikan jaring	1	v	ada
Transit sheed	1	v	ada
Laboratorium	0	x	tidak ada
Kantor administrasi pelabuhan	1	v	ada

Kantor swasta lainnya	1	v	ada
Alat-alat angkut ikan	1	v	ada
Alat-alat angkut es	1	v	ada
IPAL	1	x	ada, belum berfungsi
fasilitas penunjang			
Balai pertemuan nelayan	0	x	tidak ada
Mess Operator	1	v	ada, kondisi baik
Pos jaga	1	v	ada, kondisi baik
Pos pelayanan terpadu	1	v	ada, kondisi baik
Tempat penginapan nelayan	0	x	tidak ada
Tempat peribadatan	1	v	ada, kondisi baik
Mandi cuci kakus (MCK)	1	v	ada, kondisi baik
Guest House	0	x	tidak ada
Kios	1	v	ada, kondisi baik
IPTEK	0	x	tidak ada
Jumlah	35		

Sumber: Data hasil survey lapang dan data UPPPP Mayangan 2010

Data Tabel 20 di atas menunjukkan hasil bahwa ketersediaan fasilitas pelabuhan di PPP Mayangan yang meliputi dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, serta fasilitas penunjang adalah berjumlah 35 fasilitas yang tersedia dari yang ada untuk fasilitas pelabuhan perikanan di Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan berjumlah 43 fasilitas pelabuhan perikanan. Hal ini menandakan bahwa fasilitas di PPP Mayangan secara ketersediaan seluruhnya masih belum sesuai dengan yang di harapkan dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Perikanan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini tersedia Tabel 21 yang membahas tentang presentase ketersediaan secara keseluruhan tentang fasilitas pelabuhan di PPP Mayangan.

Tabel 21. Persentase ketersediaan fasilitas PPP Mayangan

Fasiltas Keseluruhan		Persen
ada	35	81.40
tidak ada	8	18.60

Data Tabel 21 menerangkan lebih jelas mengenai ketersediaan fasilitas keseluruhan di PPP Mayangan. Fasilitas yang tersedia dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang adalah sebanyak 35 fasilitas, dan yang tidak ada sesuai Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan yaitu sebanyak 8 fasilitas. Jadi data tersebut menghasilkan presentase ketersediaan fasilitas secara keseluruhan di PPP Mayangan adalah sebanyak 81.40% dan yang tidak ada adalah 18.60% dan semua fasilitas yang tersedia tersebut dapat menunjang semua kegiatan perikanan di PPP Mayangan untuk sementara ini. Di bawah ini adalah Gambar 32 mengenai tentang presentase ketersediaan fasilitas PPP Mayangan dan untuk lebih jelasnya mengenai fasilitas keseluruhan PPP Mayangan dapat di lihat masterplan atau lay out pada Lampiran 3.

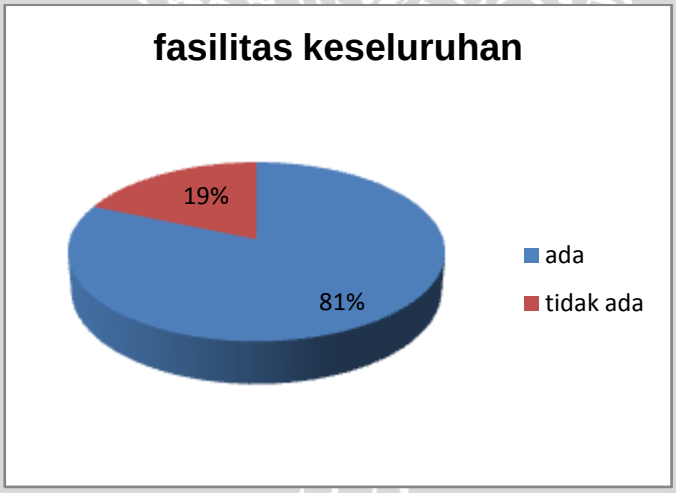

Gambar 32. Presentase ketersediaan fasilitas keseluruhan (Oktober 2010)

4.2.2 PPP Tamperan

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan adalah pelabuhan yang terletak di Kabupaten Pacitan. PPP Tamperan ini dibangun semulanya dengan perencanaan hanya dirancang untuk Pelabuhan Tipe D atau Pangkalan Pendaratan Ikan mengingat pada saat itu jumlah armada masih sedikit dan ukuran perahu yang mendarat juga berukuran kecil, namun dengan tuntutan

masyarakat dan juga dengan potensi lestari sumberdaya perikanan laut Kabupaten Pacitan sebesar 34.483 ton per tahun, maka dibangun PPP Tamperan yang dimaksudkan untuk meningkatkan prasarana perikanan sebagai sentra kegiatan kelautan dan perikanan yang memadai untuk mengembangkan potensi penangkapan ikan di pantai selatan Kabupaten Pacitan. Pembangunan ini meliputi fasilitas pelabuhan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang.

4.2.2.1 Fasilitas Pokok PPP Tamperan

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal. Adapun penjelasan tentang ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan tersaji pada Tabel 22 di bawah ini.

Tabel 22. Fasiltas Pokok PPP Tamperan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah/Volume
	Fasilitas Pokok	
1	Lahan	3.5 HA
2	*Breakwater*	P= 765.6 m
3	*Revetment*	P= 275 m
4	Dermaga	P= 210 m
5	Drainase	P= 731 m^2
6	Kolam Pelabuhan	Luas= 6.4 HA
7	Jalan	P= 1.524 m

Sumber: Data UPPPP Tamperan 2010

Data Tabel 22 di atas diperoleh dari data UPPPP Tamperan untuk kondisi fasilitas pokok sementara pada laporan tahunan yang dibuat oleh UPPPP Tamperan sebagai bahan laporan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, dan sebagai bahan dokumentasi atau arsip laporan setiap tahun untuk sarana dan prasarana pembangunan pelabuhan di PPP Tamperan.

Perkembangan pembangunan fasilitas pokok dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 di PPP Tamperan dapat di lihat pada Tabel 23 di bawah ini.

Tabel 23. Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pokok PPP Tamperan

No	Jenis fasilitas	Rencana Dibangun	Dibangun s/d tahun 2005	Dibangun s/d tahun 2007	Dibangun s/d tahun 2008	Dibangun s/d tahun 2009	Dibangun s/d tahun 2010
I	**Fasilitas Pokok**						
1	Lahan PPP	3.5 HA	2.05 HA	2.05 HA	3.5 HA	3.5 HA	3.5 HA
2	Breakwater	765.6 M2	431.9 M2	460.9 M2	765.6 M2	765.6 M2	765.6 M2
3	Dermaga Caisson	360 M2	–	360 M2	360 M2	360 M2	360 M2
4	Kolam Labuh	6.5 HA	–	4.5 HA	6.4 HA	6,4 HA	6.4 HA
5	Revetment	275 M	–	275 M	275 M	275 M	275 M

Sumber: Data UPPPP Tamperan 2010

Data Tabel 23 di atas mejelaskan bahwa perkembangan pembangunan fasilitas pokok di PPP Tamperan sudah terlaksana sesuai rencana pembangunan dengan dana dari berbagai pihak meliputi dana APBN dan APBD I. Pembangunan di PPP Tamperan di mulai pada tahun 2003 dengan lahan yang tersedia adalah 3,5 Ha, pada awalnya Tamperan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Akan tetapi Kabupaten Pacitan sendri membutuhkan suatu sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Dengan banyak pertimbangan maka daerah Tamperan dibangun sebagai pelabuhan perikanan yang dapat menampung semua kegiatan perikanan dari mulai nelayan lokal, dan nelayan andon. Fasilitas pokok di PPP Tamperan sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Perikanan untuk menjadi PPP sebenarnya masih membutuhkan luas lahan seluas kurang lebih 5 Ha dan Tamperan sendiri tidak memenuhi syarat tersebut dengan lahan yang dimiliki oleh PPP Tamperan adalah 3,5 Ha. Pembangunan fasilitas pokok yang lain dibangun pada tahun 2007 dengan waktu operasional PPP Tamperan adalah pada bulan april 2008.

Jadi pembangunan semua fasilitas pelabuhan dibangun di atas lahan seluas 3,5 Ha dengan cara memaksimalkan penggunaan tata guna lahan yang telah ada,, hal ini dikerenakan lokasi PPP Tamperan sendiri berada diantara pelengsengan bukit dan tempat wisata Telengria. Oleh sebab itu PPP Tamperan mengalami kesulitan untuk perluasan lahan pelabuhan.

Penilaian ketersediaan menurut data hasil survey penelitian pada waktu penelitian mengenai ketersediaan fasilitas pokok di PPP Tamperan adalah sebagai berikut dilihat dari 11 parameter fasilitas pokok berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 maka di bawah ini adalah Tabel 24 penilaian ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan.

Tabel 24. Penilaian ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan

Fasilitas Pokok PPP Tamperan			
Unit	Ketersediaan fasilitas	Aktivitas	Keterangan
Pemecah Gelombang	1	v	ada, kondisi baik
Revetment (turap penahan tanah)	1	v	ada, kondisi baik
Groin	1	v	ada, kondisi baik
Dermaga	1	v	ada, kondisi baik
Jetty	0	x	tidak ada
Kolam Pelabuhan	1	v	ada, kondisi baik
Alur pelayaran	1	v	ada, kondisi baik
Jalan	1	v	ada, kondisi baik
Drainase	1	v	ada, kondisi baik atau lancar
Gorong-gorong	1	v	ada, kondisi kurang terawat
Lahan	1	v	Ada, kurang memadai
Jumlah	10		

Sumber: Data hasil survey lapang dan data UPPPP Tamperan 2010

Hasil survey lapang tentang fasilitas pokok yang tersedia di PPP Tamperan adalah 10 parameter ini berbeda dengan jumlah yang ada pada dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Perikanan yang mana ada 11 parameter fasilitas pokok.

Fasilitas pokok di PPP Tamperan yang belum tersedia ini adalah *Jetty*, yang mana rencana pembangunan *jetty* ini akan dimasukkan dalam rencana pembangunan tahun 2010 untuk diajukan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. *Jetty* ini dibangun untuk memudahkan proses bongkar muat di dermaga PPP Tamperan. Hal ini dikarenakan kondisi kolam labuh di PPP Tamperan jika pada waktu surut terendah mengalami kedalaman yang cukup dalam untuk proses bongkar muat, sehingga para nelayan menginginkan *jetty* atau undakan untuk memudahkan proses bongkar muat kapal di dermaga PPP Tamperan.

Data Tabel di atas tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui presentase ketersediaan fasilitas pokok di PPP Tamperan, untuk lebih jelasnya di bawah ini tersaji Tabel 25 yang mejelaskan tentang presentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan dan tersedia juga Gambar 33 tentang diagram pie untuk presentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan.

Tabel 25. Persentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan

Fasiltas Pokok		Prosen
ada	10	90.91
tidak ada	1	9.09

Data Tabel 25 di atas menunjukkan bahwa hasil persentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan adalah 90.91% dari 100% fasilitas pokok yang sesuai dengan dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004. Berikut di bawah ini adalah Gambar 33 mengenai diagram pie presentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan.

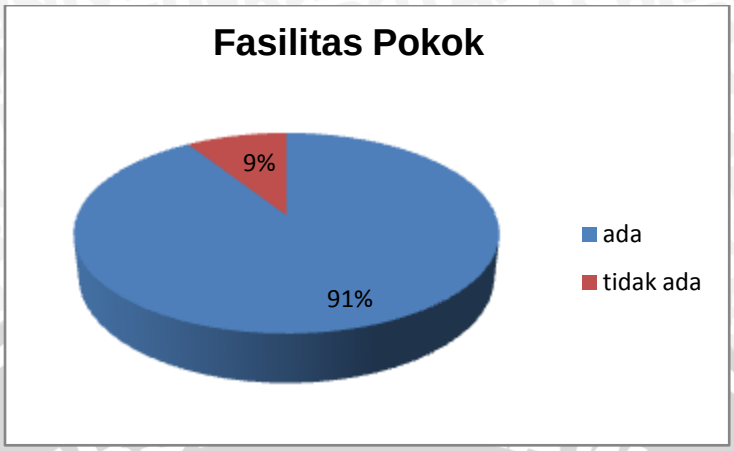

Gambar 33. Presentase ketersediaan fasilitas pokok (Agustus-September 2010)

Fasilitas pokok di PPP Tamperan dapat dijelaskan sebagai berikut dan beberapa fasilitas pokok tergambar pada Gambar 34 sampai dengan Gambar 40 seperti di bawah ini.

1. *Breakwater*

   Fungsi *breakwater* selain sebagai pelindung terhadap gelombang, juga sebagai kontruksi penahan sedimentasi. Konstruksi *breakwater* berupa batu tumpukan atau disebut juga *caison*. *Breakwater* ini mempunyai panjang 765,6 m. Batu yang dipakai untuk breakwater di PPP Tamperan adalah batu sejenis batu kapur, hal ini dikarenakan batu jenis ini yang banyak ditemukan di daerah Pacitan.

2. *Revetment*

   Revetment merupakan bangunan yang berfungsi untuk menahan tanah agar tidak longsor dan juga berfungsi sebagai penahan gelombang. *Revetment* yang ada di UPPPP Tamperan mempunyai panjang 275 m. Biasanya dipergunakan sebagai alternatif jalan untuk menuju ke breakwater oleh para pemakai pelabuhan (nelayan, petugas PPP Tamperan, masyarakat). Kondisi revetment di PPP Tamperan kalau

musim hujan tidak bagus, karena terbuat dari tumpukan tanah dan batu sehingga licin untuk dijadikan jalan.

3. Groin

Groin adalah fasilitas yang berfungsi sebagai lahan penampung endapan sedimentasi pasir atau bahan material lain yang terbawa oleh arus laut yang masuk ke kolam pelabuhan. Setelah itu endapan material tersebut dikeruk atau *dreadging* agar tidak mengakibatkan pendangkalan pada kolam pelabuhan dan menghambat proses bongkar muat kapal.

4. Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan untuk merapatkan dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat ikan. Konstruksi dermaga yang ada di UPPPP Tamperan berupa cor dengan panjang 210 m. Dermaga yang ada adalah dalam bentuk caisson.

5. Kolam Pelabuhan

Kolam pelabuhan digunakan sebagai tempat tambat labuh bagi kapal-kapal yang beroperasi di UPPPP Tamperan. Pada saat ini kolam pelabuhan yang ada di UPPPP Tamperan yaitu kolam yang mempunyai kedalaman 2 m pada surut terendah dengan luas 6,4 Ha. Dengan luas 6,4 Ha kolam pelabuhan di PPP Tamperan di bangun sesuai kondisi perikanan sekarang yakni dengan jumlah dan ukuran kapal yang ada sekarang. Rata-rata kapal yang menggunakan kolam pelabuhan ini berukuran 5 GT sampai dengan 30 GT.

6. Alur Pelayaran

Alur pelayaran di UPPPP Tamperan sistemnya satu arah dan dua arah, hal ini dilihat dari model parkir kapal yang datang untuk masuk ke kolam pelabuhan.

7. Jalan

Jalan merupakan fasilitas untuk memperlancar distribusi hasil perikanan dan bahan perbekalan maupun bahan-bahan keperluan kapal ikan. Jalan yang ada di UPPPP Tamperan mempunyai panjang 1.524 m. Jalan dalam kondisi sangat baik sehingga kendaraan dapat melewatinya dengan nyaman dan disribusi ikan juga dapat berjalan dengan lancar. Tetapi jalan yang berada di dalam PPP Tamperan masih berupa tanah, hanya sebagian yang di aspal dan di cor.

8. Drainase

Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara natural maupun dibuat oleh manusia, drainase penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. Menurut Suripin drainase adalah mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase di PPP Tamperan ini didapatkan dari ground reservoir atau sumur. PPP Tamperan juga memiliki menara air untuk memenuhi kebutuhan para pemakai failitas pelabuhan.

9. Gorong-gorong

Gorong-gorong merupakan saluran air dalam tanah, atau juga bisa disebut dengan sebutan got. Gorong-gorong ini difungsikan untuk fasilitas yang membantu dalam kelancaran penyaluran aliran air bersih maupun pembuangan air limbah untuk di olah ke Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan PPP Tamperan.

10. Lahan

Lahan merupakan fasilitas penting pada pengembangan pembangunan PPP Tamperan, dengan adanya lahan 3,5 Ha maka PPP Tamperan masih belum bisa memenuhi kebutuhan fasilitas pokok dengan menyuluruh sesuai PER.16/MEN/2006 dan KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan yang menyebutkan bahwa lahan untuk Pelabuhan Perikanan Pantai atau Pelabuhan Perikanan golongan C di harapkan memiliki lahan 5 Ha sampai dengan 15 Ha dan lahan PPP Tamperan sendri adalah 3,5 Ha yang tidak sesuai dari ketentuan dasar PER.16/MEN/2006 dan KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 34 sampai Gambar 40 tentang beberapa fasilitas pokok di PPP Tamperan.

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 34. PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 35. *Breakwater* atau pemecah gelombang PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 36. Gorong-gorong atau got PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 37. Dermaga dan kolam pelabuhan PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 38. Ground Resevoir dan menara air PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 39. Jalan PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 40. *Revetment* PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

4.2.2.2 Fasilitas Fungsional PPP Tamperan

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. Fasilitas fungsional terdiri dari fasilitas yang dapat diusahakan dan fasilitas yang tidak dapat diusahakan, masing-masing memiliki kriteria sendiri-sendiri. Fasilitas fungsional yang tersedia di PPP Tamperan dapat di lihat pada Tabel 26 di bawah ini.

Tabel 26. Fasiltas Fungsional PPP Tamperan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah/Volume
	Fasilitas Fungsional	
1	Rambu Pelayaran	1 unit
2	Lampu Suar	4 unit
3	Air/Ground resevoir	50 m^2
4	Mesin Genset	30.000VA
5	SPDN	45m^2
6	TPI	1160 m^2
7	IPAL	100 m^2

Sumber: Data UPPPP Tamperan 2010

Data Tabel 26 di atas diperoleh dari data UPPPP Tamperan untuk kondisi fasilitas pokok sementara pada laporan tahunan yang dibuat oleh UPPPP Tamperan sebagai bahan laporan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, dan sebagai bahan dokumentasi atau arsip laporan setiap tahun untuk sarana dan prasarana pembangunan pelabuhan di PPP Tamperan.

Perkembangan pembangunan fasilitas pokok dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 di PPP Tamperan dapat di lihat pada Tabel 27 di bawah ini.

Tabel 27. Perkembangan Pembangunan Fasilitas Fungsional PPP Tamperan

No	Jenis fasilitas	Rencana Dibangun	Dibangun s/d tahun 2005	Dibangun s/d tahun 2007	Dibangun s/d tahun 2008	Dibangun s/d tahun 2009	Dibangun s/d tahun 2010
II	**Fasilitas Fungsional**						
1	Gedung TPI	1.160 M^2	160 M^2	1.160 M^2	1.160 M^2	1.160 M^2	1.160 M^2
2	Pabrik Es	288 M^2	–	–	–	–	–
3	Kantor Pelabuhan	220M^2	–	–	–	–	360 M^2

4	Kantor keamanan terpadu	45 M^2	–	–	–	–	–
5	Ground Resevoir	50 M^3	–	50 M^3	50 M^3	50 M^3	50 M^3
6	Power House	81 M^2	–	20 M^2	81 M^2	81 M^2	81 M^2
7	Menara air	18 M^3	10 M^3	18 M^3	18 M^3	18 M^3	18 M^3
8	Bengkel	288 M^2	–	–	–	–	288 M^2
9	SPDN	45 M^2	–	45 M^2	45 M^2	45 M^2	45 M^2
10	Gudang Es dan Garam	288 M^2	–	–	288 M^2	288 M^2	288 M^2
11	Slipway	66 M	–	–	–	–	–
12	IPAL	74.25 M^2	–	–	–	–	74.25 M^2
13	Transit sheed	1 unit	–	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

Sumber: Data UPPPP Tamperan 2010

Data Tabel 27 di atas menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan fasilitas fungsional di PPP Tamperan masih belum sesuai rencana pembangunan yang ditentukan sampai pada saat penelitian berlangsung. Selama penelitian berlangsung kondisi PPP Tamperan dalam tahap pembangunan untuk fasilitas-fasilitas yanga belum terpenuhi. Pembangunan fasilitas tersebut melainkan pembangunan jalan di dalam kawasan PPP Tamperan untuk penghubung ke fasilitas-fasilitas lainnya apabila musim hujan tidak tergenang air. Kantor keamanan laut terpadu (KAMLADU) pada waktu penelitian berlangsung masih menempati satu kantor dengan kantor administrasi pelabuhan atau kantor pelabuhan. KAMLADU rencana dibangun pada akhir tahun 2010 atau awal tahun 2011 yang lokasinya sebelah barat pelabuhan atau dekat dengan kios kering di PPP Tamperan. Kantor swasta lain adalah kantor koperasi yang berlokasi di luar pelabuhan. Pembangunan fasilitas fungsional lainnya masih belum ada karena terbatasnya lahan untuk pengembangan pembangunan di PPP Tamperan.

Hasil survey pada penelitian tentang fasilitas fungsional serta kondisinya menurut dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 dengan penilaian ketersediaan dari 22 parameter yang diujikan maka dapat di lihat pada Tabel 28 yang tersaji di bawah ini.

Tabel 28. Penilaian ketersediaan fasilitas fungsional PPP Tamperan

Fasilitas Fungsional PPP Tamperan			
Unit	**Ketersediaan fasilitas**	**Aktivitas**	**Keterangan**
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	v	ada, kondisi baik
Pasar Ikan	0	x	tidak ada
Telepon	1	v	ada, kondisi baik
Internet	0	x	tidak ada
SSB(*Single Side Band*)	1	v	ada, kondisi rusak
Rambu-rambu	1	v	ada, kondisi baik
Lampu suar	1	v	ada, kondisi baik
Menara pengawas	1	v	ada, kondisi baik
Air bersih	1	v	ada
Es	1	v	ada
Listrik	1	v	ada
Bahan bakar	1	v	ada
Dock/slipway	0	x	tidak ada
Bengkel	1	x	ada, belum berfungsi
Tempat perbaikan jaring	1	v	ada
Transit sheed	1	v	ada
Laboratorium	0	x	tidak ada
Kantor administrasi pelabuhan	1	v	ada
Kantor swasta lainnya	1	v	ada
Alat-alat angkut ikan	1	v	ada
Alat-alat angkut es	1	v	ada
IPAL	1	x	ada, belum berfungsi
Jumlah	18		

Sumber: Data hasil survey lapang dan data UPPPP Tamperan 2010

Hasil survey lapang tentang fasilitas fungsional yang tersedia di PPP Tamperan sejumlah 18 parameter, banyak parameter ini berbeda dengan jumlah yang ada pada dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Perikanan yang mana ada 22 parameter fasilitas fungsional. Fasilitas fungsional di PPP Tamperan yang belum tersedia ini adalah pasar ikan, *slipway*, dan laboratorium. Pasar ikan ini menurut hasil wawancara pada saat penelitian sudah dibangun, yaitu menggunakan kantor TPI lama yang dahulu dipakai pada waktu Tamperan masih sebagai

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Tetapi berita tersebut masih simpang siur dan menjadi bahan perencanaan pengembangan pengelolaan fasilitas yang dimiliki oleh PPP Tamperan. Rencana pembangunan *slipway* / tempat docking kapal masih dalam tahap rencana, karena terhambatnya lahan pembangunan untuk pengembangan pembangunan fasilitas pelabuhan. Dan pembangunan laboratorium untuk pengujian mutu ikan juga masih dalam wacana dan rencana, hal ini disebabkan kekurangan lahan di PPP Tamperan.

Data Tabel di atas tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui presentase ketersediaan fasilitas pokok di PPP Tamperan, untuk lebih jelasnya di bawah ini tersaji Tabel 29 yang mejelaskan tentang presentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan dan tersedia juga Gambar 41 tentang diagram pie untuk presentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan.

Tabel 29. Persentase ketersediaan fasilitas fungsional PPP Tamperan

Fasiltas Fungsional		Persen
ada	18	81.82
tidak ada	4	18.18

Data Tabel 29 di atas menunjukkan bahwa hasil persentase ketersediaan fasilitas fungsional PPP Tamperan adalah 81,82% dari 100% fasilitas pokok yang sesuai dengan dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004. Berikut di bawah ini adalah Gambar 41 mengenai diagram pie presentase ketersediaan fasilitas pokok PPP Tamperan.

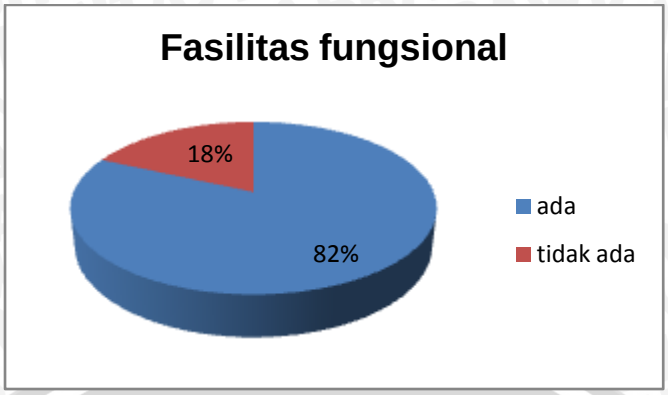

Gambar 41. Presentase ketersediaan fasilitas fungsional (Agustus-September 2010)

Fasilitas fungsional di PPP Tamperan dapat dijelaskan sebagai berikut dan beberapa fasilitas fungsional tergambar pada Gambar 42 sampai dengan Gambar 52 seperti di bawah ini.

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

   TPI sangat bermanfaat bagi nelayan untuk memudahkan proses pelelangan agar berjalan dengan baik dan terkoordinir sehingga penanganan ikan dapat dilakukan dengan cepat mengingat sifat ikan yang mudah rusak/busuk. Akan tetapi di UPPPP Tamperan pelelangan belum berjalan sehingga TPI hanya digunakan sebagai tempat penimbangan ikan hasil tangkapan dan transaksi dengan bakul. TPI di UPPPP Tamperan memiliki luas 1.160 m^2 dan dalam kondisi baik, karena dibangun pada tahun 2007. Sebelumnya TPI di Tamperan memakai bangunan TPI lama yang wacananya akan dipergunakan sebagai pasar ikan. Tetapi sampai saat penelitian berlangsung masih belum terpakai.

2. Rambu Pelayaran

   Rambu pelayaran digunakan sebagai pandu pada saat kapal akan masuk ke pelabuhan dan bersandar. Rambu pelayaran di UPPPP Tamperan ada 1 unit dan dalam kondisi baik.

3. Lampu suar

   Lampu suar merupakan bangunan menara yang cahayanya dipancarkan untuk membantu navigasi kapal laut. Lampu suar yang ada di UPPPP Tamperan ada 4 unit 3 unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam keadaan rusak.

4. Ground resevoir

   Fasilitas ground resevoir di UPPPP Tamperan memberikan pelayanan penyaluran air tawar dengan pemompaan memakai jet pump Merek ”Multi Pro DP 505A-MP” dalam kondisi baik. Air tanah ini dipergunakan untuk kebutuhan semua pengguna atau pemakai fasilitas pelabuhan.

5. Mesin Genset

   Mesin genset yang dimiliki UPPPP Tamperan ini sebanyak 1 unit dan mempunyai daya total sebesar 30.000VA. Mesin genset ini digunakan memenuhi kebutuhan listrik di UPPPP Tamperan dan dalam kondisi masih bagus karena pengadaan barang tersebut pada tahun 2008. Selain dengan genset di PPP Tamperan juga memakai listrik PLN untuk semua kebutuhan di pelabuhan yang kondisinya kurang bagus, karena jumlah pemakai dan kapasitas listrik dengan daya 4.200 VA tidak seimbang.

6. SPDN

   SPDN merupakan singkatan dari *Solar Package Dealer Nelayan*. SPDN yang berada di area pelabuhan dapat memudahkan nelayan untuk memperoleh bahan bakar berupa solar sebagai bahan bakar utama yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. Nelayan dapat membeli solar dengan harga subsidi dari pemerintah yaitu Rp.4.500/liter. SPDN di UPPPP Tamperan sebanyak 1 unit dengan kapasitas 144.000 liter/bulan untuk solar dan 48.000 liter/bulan untuk premium. SPDN di UPPP Tamperan hanya melayani pengisian bahan bakar untuk kapal yang

berkapasitas di bawah 30 GT, untuk kapal dengan daya muat di atas 30 GT pembeliaan bahan bakar pesan langsung ke SPBU pusat Surabaya dengan harga Rp. 6.500/liter.

7. Bengkel

   Bengkel di PPP Tamperan masih dalam kondisi baru, pada saat penelitian bengkel ini belum beroperasi. Bengkel ini belum ada petugas yang mengelolanya. Oleh karena itu bengkel ini masih tidak terpakai dan tidak dapat membantu para nelayan yang mengalami kerusakan mesin kapal.

8. Tempat perbaikan jaring

   Tempat perbaikan jaring di PPP Tamperan dilakukan di daerah pinggir dermaga pelabuhan, dan tidak jarang para nelayan juga melakukan perbaikan jaring di atas kapal. Hal ini biasanya dilakukan oleh nelayan tradisional yang memiliki kapal dengan kapasitas 5 GT, walaupun sudah tersedia gudang bahan alat penangkapan di PPP Tamperan yang memudahkan para nelayan untuk memeperbaiki jaring dan menyimpan jaring di sana.

9. Transit Sheed

   Transit Sheed adalah tempat untuk menampung hasil tangkapan ikan dari kapal yang baru datang beoperasi dan ingin melakukan pendaratan serta bongkar muat dan antre untuk melakukan penimbangan di TPI Tamperan. Transit Sheed yang di PPP Tamperan ini terletak di depan TPI Tamperan.

10. Kantor Administrasi Pelabuhan

    Kantor adsministrasi pelabuhan adalah kantor yang menangani administrasi mengenai semua persoalan di pelabuhan, mulai dari administrasi pelabuhan, jasa, serta pengembangan pelabuhan dan kesejahteraan nelayan.

11. Kantor swasta lainnya

Kantor swasta lainnya yang dimaksud adalah kantor koperasi yang membantu dalam perekonomian nelayan dan proses penjualan ikan dengan kerjasama kepada para penjual ikan atau pemilik kapal. Letak koperasi ini masih berada di luar dari PPP Tamperan. Dan koperasi ini bernama KUD MINA PACITAN yang juga mengelola SPDN di PPP Tamperan.

12. Alat-alat angkut ikan

Alat–alat angkut ikan adalah alat untuk memudahkan mengangkut ikan dari kapal ke dermaga atau ketempat penimbangan yang terbuat dari fiber, plastik. Alat-alat angkut ikan yang tersedia di PPP Tamperan disediakan dan di kelola oleh TPI Tamperan.

13. Alat-alat angkut es

Alat-alat angkut es di PPP Tamperan yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan dan pedagang ikan yaitu dengan mengankut es dengan basket fiber atau dengan bantuan becak, pick up, atau truck. Nelayan di Pacitan dibedakan nelayan ngebok dan nelayan harian. Oleh karena itu nelayan harian biasanya tidak membawa es untuk operasi penangkapan, es dibutuhkan pada saat mereka tiba di pelabuhan. Yang biasanya mebawa es adalah nelayan ngebok dan biasanya membutuhkan es untuk selama ngetrip sebanyak 15-60 balok es, sedangkan harian hanya mebutuhkan es sebanyak 2-3 balok es saja. Dengan harga 1 balok es untuk kapal adalah Rp. 8.000/balok dan untuk pedagang ikan harga 1 balok es adalah Rp. 8.500/balok.

14. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

IPAL merupakan instalasi yang digunakan untuk mengolah limbah cair yang merupakan air buangan yang ada di UPPPP Tamperan dimana

limbah tersebut diproses melalui 4 tahapan, antara lain proses *anaerobic, aerobic*, *filtrasi*, dan yang terakhir proses *chlorinasi*. Air limbah yang telah diolah oleh IPAL nantinya dibuang lagi ke laut. IPAL yang ada di UPPPP Tamperan seluas 74,25 m^2 dengan tahun pengadaan pembangunan 2009 dan pada saat penelitian berlangsung masih belum beroperasi. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 42 sampai Gambar 52 tentang beberapa fasilitas fungsional di PPP Tamperan.

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 42. TPI PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 43. Rambu suar PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 44. Gudang BAP PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 45. Alat-alat angkut ikan dan Alat-alat angkut es PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 46. Kantor administrasi pelabuhan dan kantor KAMLADU sementara PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 47. Transit sheed PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 48. Ground resevoir dan menara air atau tandon air PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

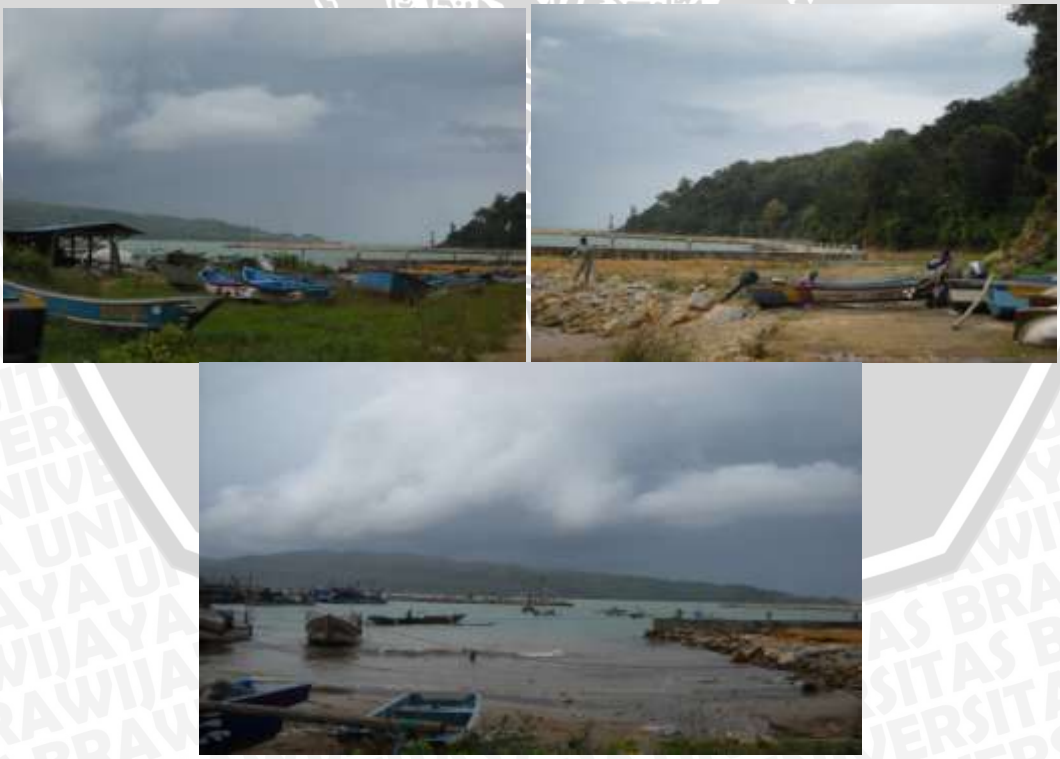

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 49. Lokasi yang direncanakan untuk *slipway* di PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 50. SPDN PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 51. IPAL PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010
Gambar 52. Rumah genset PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

4.2.2.3 Fasilitas Penunjang PPP Tamperan

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas penunjang yang tersedia di PPP Tamperan dapat di lihat pada Tabel 30 di bawah ini.

Tabel 30. Fasiltas Penunjang PPP Tamperan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah/Volume
	Fasilitas Penunjang	
1	Pos Jaga	1 unit
2	MCK	80 m^2
3	Kios nelayan/toko/waserda	21 unit
4	Mushola	100 m^2
5	Mess Operator	100 m^2

Sumber: Data UPPPP Tamperan 2010

Tabel 30 di atas diperoleh dari data UPPPP Tamperan untuk kondisi fasilitas penunjang pada laporan tahunan yang dibuat oleh UPPPP Tamperan sebagai bahan laporan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, dan sebagai bahan dokumentasi atau arsip laporan setiap tahun untuk sarana dan prasarana pembangunan pelabuhan di PPP Tamperan.

Perkembangan pembangunan fasilitas penunjang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 di PPP Tamperan dapat di lihat pada Tabel 31 di bawah ini.

Tabel 31. Perkembangan Pembangunan Fasilitas Penunjang PPP Tamperan

No	Jenis fasilitas	Rencana Dibangun	Dibangun s/d tahun 2005	Dibangun s/d tahun 2007	Dibangun s/d tahun 2008	Dibangun s/d tahun 2009	Dibangun s/d tahun 2010
III	**Fasilitas Penunjang**						
1	Gedung Pertemuan nelayan	220 M^2	_	_	220 M^2	220 M^2	220 M^2
2	Pos Jaga	12.6 M^2	_	_	12.6 M^2	12.6 M^2	12.6 M^2
3	Tempat Peribadatan	100 M^2	_	100 M^2	100 M^2	100 M^2	100 M^2
4	MCK/Toilet	80 M^2	_	30 M^2	80 M^2	80 M^2	80 M^2
5	Kios						
	basah	10 unit	_	_	_	10 unit	10 unit
	kering	3 unit	_	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
		8 unit	_	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
6	Pos KAMLADU	12,6 M^2	_	_	12,6 M^2	12,6 M^2	12,6 M^2
7	Kantin	1 unit	_	_	_	_	_
8	Rumah Dinas	1 unit	_	_	_	1 unit	1 unit
9	kantor Koperasi	1 unit	_	_	_	_	_
10	Tempat parkir	1 unit	_	_	_	1 unit	1 unit

Sumber: Data UPPPP Tamperan 2010

Data tabel perkembangan pembangunan fasilitas penunjang PPP Tamperan di atas menunjukkan bahwa masih ada beberapa fasilitas yang belum dibangun sesuai rencana pembangunannya, yaitu kantin dan kantor koperasi. Tetapi di PPP Tamperan sudah memiliki banyak kios kering yang dipergunakan sebagai warung makan dan menjual alat-alat penangkapan. Dan untuk kantor koperasi sendiri masih belum ada di lokasi PPP Tamperan, melainkan berada di di luar kawasan PPP Tamperan yang mana koperasi itu adalah KUD MINA PACITAN yang membantu pengelolaan beberapa fasilitas di pelabuhan seperti diantaranya yaitu pengelolaan TPI Tamperan, SPDN Tamperan yang dikelola oleh KUD MINA PACITAN.

Hasil survey di PPP Tamperan pada penelitian tentang fasilitas penunjang serta kondisinya menurut dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 dengan penilaian ketersediaan dari 10 parameter yang diujikan maka dapat di lihat pada Tabel 32 yang tersaji di bawah ini.

Tabel 32. Penilaian ketersediaan fasilitas penunjang PPP Tamperan

Fasilitas Penunjang PPP Tamperan			Keterangan
Unit	Ketersediaan fasilitas	Aktivitas	
Balai pertemuan nelayan	1	v	ada
Mess Operator	1	v	ada, kondisi baik
Pos jaga	1	v	ada, kondisi baik
Pos pelayanan terpadu	1	v	ada, kondisi baik
Tempat penginapan nelayan	1	v	ada
Tempat peribadatan	1	v	ada, kondisi baik
Mandi cuci kakus (MCK)	1	v	ada, kondisi baik
Guest House	0	x	tidak ada
Kios	1	v	ada, kondisi baik
IPTEK	0	x	tidak ada
Jumlah	8		

Sumber: Data hasil survey lapang dan data UPPPP Tamperan 2010

Fasilitas penunjang di PPP Tamperan secara ketersediaan hanya tersedia 8 fasilitas dari yang seharusnya tersedia 10 fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004. Fasilitas penunjang yang belum ada di PPP Tamperan adalah Guest House dan gedung untuk IPTEK. Tetapi ada fasilitas pengganti lainnya yaitu rumah dinas atau direksikit dan untuk gedung IPTEK sementara belum tersedia. Dan penyampaian IPTEK ke nelayan biasanya disampaikan pada waktu acara perkumpulan nelayan yang diadakan di balai pertemuan nelayan di PPP Tamperan. Lebih jelasnya untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas penunjang sesuai data persentase adalah seperti Tabel 33 yang tersaji di bawah ini.

Tabel 33. Persentase ketersediaan fasilitas penunjang PPP Tamperan

Fasiltas Penunjang		Persen
ada	8	80
tidak ada	2	20

Data Tabel 33 di atas menunjukkan bahwa hasil persentase ketersediaan fasilitas penunjang PPP Tamperan adalah 80% dari 100% fasilitas penunjang yang sesuai dengan dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004. Berikut di bawah ini adalah Gambar 53 mengenai diagram pie presentase ketersediaan fasilitas penunjang PPP Tamperan.

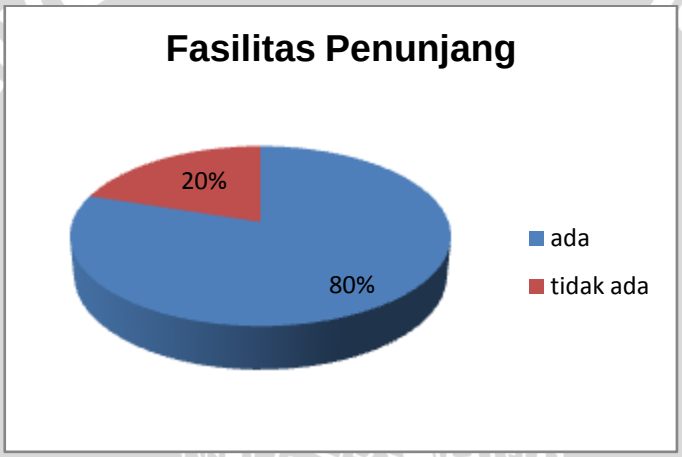

Gambar 53. Presentase ketersediaan fasilitas penunjang (Agustus-September 2010)

Fasilitas penunjang PPP Tamperan yang tersedia secara lebih jelasnya sesuai ketersediaan dan kondisinya dapat di jelaskan di bawah ini beserta beberapa fasilitas penunjang di PPP Tamperan yang tergambar pada Gambar 54 sampai dengan Gambar 63.

1. Mess operator

   Mess operator adalah fasilitas penunjang yang diperuntukkan untuk memantau atau mengoperasikan power house di pelabuhan.

2. Pos Jaga

   Pos jaga di UPPPP Tamperan ada di pintu masuk PPP Tamperan, yaitu pos ini memiliki luas bangunan 12,6 m^2.

3. Pos pelayanan terpadu

Pos pelayanan terpadu adalah pos untuk pengawasan keamanan di pelabuhan, dan pos pelayanan terpadu ini dibangun dekat dengan pos jaga sebelah dengan tempat peribadatan dengan luas 12,6 m^2 dan bangunannya tingkat. Hal ini untuk memudahkan pemantauan kondisi laut dari tempat yang lebih tinggi.

4. Tempat peribadatan

Tempat peribadatan di PPP Tamperan adalah moshola yang dibangun pada tahun 2007 dengan luas 100 m^2 dan dapat menampung jama'ah sebanyak lebih dari 40 jama'ah. Mushola ini sering dipergunakan oleh semua pegawai pelabuhan di PPP Tamperan dan para nelayan serta para pengunjung dan pemakai pelabuhan. Keadaan mushola baik, dan terawat.

6. Mandi Cuci Kakus (MCK)

MCK sangat dibutuhkan bagi pengguna pelabuhan. Meskipun termasuk dalam fasilitas penunjang, tetapi MCK harus ada. DI UPPPP Tamperan, MCK dibangun seluas 80 m^2.

7. Tempat Parkir

Fasilitas tempat parkir ini digunakan untuk memarkir kendaraan baik yang dimiliki oleh bakul-bakul maupun pengunjung. Tempat parkir yang ada di UPPPP Tamperan seluas 1.500 m^2.

8. Kios Nelayan/Toko/Waserda

Dengan adanya aktifitas yang dilakukan di pelabuhan, mendorong masyarakat untuk membuka usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraktifitas di pelabuhan tersebut. Untuk membantu berjalannya usaha tersebut, maka disewakan kios-kios. Jenis usaha yang dibuka sebagian besar adalah menjual makanan dan minuman. Kios yang

disewakan di UPPPP Tamperan sebanyak 11 unit yang terdiri dari 3 unit dengan luas 24 m^2 dan 8 unit dengan luas 32 m^2. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 54 sampai Gambar 63 tentang beberapa fasilitas penunjang di PPP Tamperan.

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 54. Kios kering dan kios basah PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 55. Direksikit atau rumah dinas PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 56. Tempat parkir PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 57. Pos jaga PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 58. Tempat peribadatan PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 59. Mess operator PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 60. Pos keamanan terpadu PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 61. MCK atau Toilet PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 62. Balai Pertemuan Nelayan PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

Sumber: dokumentasi penelitian 2010

Gambar 63. Tempat Penginapan Nelayan PPP Tamperan Kabupaten Pacitan

4.2.2.4 Fasilitas keseluruhan PPP Tamperan

Penilaian ketersedian fasilitas di PPP Tamperan secara keseluruhan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang adalah sebuah penilaian yang menilai tentang jumlah ketersediaan fasilitas pelabuhan yang dibandingkan dengan jumlah fasilitas pelabuhan yang ada pada dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004. Data perbandingan diperoleh dari data hasil survey di lapang pada waktu penelitian di PPP Tamperan pada bulan agustus sampai dengan bulan september tahun 2010. Data tersebut terlampir pada Tabel 34 di bawah ini beserta Tabel 35 mengenai data presentase ketersediaan fasilitas secara keseluruhan di PPP Tamperan dan Gambar 64 yang tergambar untuk menggambarkan kondisi

persentase keadaan ketersediaan keseluruhan fasilitas pelabuhan yang tersedia di PPP Mayangan.

Tabel 34. Penilaian ketersediaan fasilitas secara keseluruhan di PPP Tamperan

Fasilitas PPP Tamperan			
Unit	**Ketersediaan fasilitas**	**Aktivitas**	**Keterangan**
fasilitas pokok			
Pemecah Gelombang	1	v	ada, kondisi baik
Revetment (turap penahan tanah)	1	v	ada, kondisi baik
Groin	1	v	ada, kondisi baik
Dermaga	1	v	ada, kondisi baik
Jetty	0	x	tidak ada
Kolam Pelabuhan	1	v	ada, kondisi baik
Alur pelayaran	1	v	ada, kondisi baik
Jalan	1	v	ada, kondisi baik
Drainase	1	v	ada, kondisi baik atau lancar
Gorong-gorong	1	v	ada, kondisi kurang terawat
Lahan	1	v	ada
fasilitas fungsional			
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	v	ada, kondisi baik
Pasar Ikan	0	x	tidak ada
Telepon	1	v	ada, kondisi baik
Internet	0	x	tidak ada
SSB(*Single Side Band*)	1	v	ada, kondisi rusak
Rambu-rambu	1	v	ada, kondisi baik
Lampu suar	1	v	ada, kondisi baik
Menara pengawas	1	v	ada, kondisi baik
Air bersih	1	v	ada
Es	1	v	ada
Listrik	1	v	ada
Bahan bakar	1	v	ada
Dock/slipway	0	x	tidak ada
Bengkel	1	x	ada, belum berfungsi
Tempat perbaikan jaring	1	v	ada
Transit sheed	1	v	ada
Laboratorium	0	x	tidak ada
Kantor administrasi pelabuhan	1	v	ada
Kantor swasta lainnya	1	v	ada

Alat-alat angkut ikan	1	v	ada
Alat-alat angkut es	1	v	ada
IPAL	1	x	ada, belum berfungsi
fasilitas penunjang			
Balai pertemuan nelayan	1	v	ada
Mess Operator	1	v	ada, kondisi baik
Pos jaga	1	v	ada, kondisi baik
Pos pelayanan terpadu	1	v	ada, kondisi baik
Tempat penginapan nelayan	1	v	ada
Tempat peribadatan	1	v	ada, kondisi baik
Mandi cuci kakus (MCK)	1	v	ada, kondisi baik
Guest House	0	x	tidak ada
Kios	1	v	ada, kondisi baik
IPTEK	0	x	tidak ada
Jumlah	36		

Sumber: Data hasil survey lapang dan data UPPPP Tamperan 2010

Data Tabel 34 di atas menunjukkan hasil bahwa ketersediaan fasilitas pelabuhan di PPP Tamperan yang meliputi dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, serta fasilitas penunjang adalah berjumlah 36 fasilitas yang tersedia dari yang ada untuk fasilitas pelabuhan perikanan di Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan berjumlah 43 fasilitas pelabuhan perikanan. Hal ini menandakan bahwa fasilitas di PPP Tamperan secara ketersediaan seluruhnya masih belum sesuai dengan yang di harapkan dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Perikanan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini tersedia Tabel 35 yang membahas tentang presentase ketersediaan secara keseluruhan tentang fasilitas pelabuhan di PPP Tamperan.

Tabel 35. Persentase ketersediaan fasilitas PPP Tamperan

Fasiltas Keseluruhan		Persen
ada	36	83.72
tidak ada	7	16.28

Data Tabel 35 menerangkan lebih jelas mengenai ketersediaan fasilitas keseluruhan di PPP Tamperan. Fasilitas yang tersedia dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang adalah sebanyak 36 fasilitas, dan yang tidak ada sesuai Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan yaitu sebanyak 7 fasilitas. Jadi data tersebut menghasilkan presentase ketersediaan fasilitas secara keseluruhan di PPP Mayangan adalah sebanyak 83.72% dan yang tidak ada adalah 16.28% dan semua fasilitas yang tersedia tersebut dapat menunjang semua kegiatan perikanan di PPP Tamperan untuk sementara ini. Di bawah ini adalah Gambar 64 mengenai tentang presentase ketersediaan fasilitas PPP Tamperan dan untuk lebih jelasnya mengenai fasilitas keseluruhan PPP Tamperan dapat di lihat masterplan pada Lampiran 4.

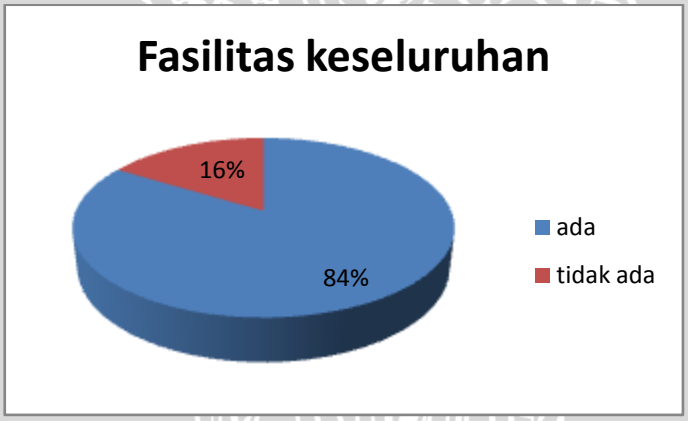

Gambar 64. Presentase ketersediaan fasilitas keseluruhan (Agustus-September 2010)

4.3 Studi Kelayakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

4.3.1 PPP Mayangan

Studi kelayakan untuk PPP Mayangan dinilai dari penilaian suatu bentuk fisik bangunan yang berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan untuk fasilitas pelabuhan dengan penggunaan fasilitas tersebut dari jumlah ketersediaannya. Ketersediaan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas

penunjang dengan ukuran standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Penilaian ini dilakukan dengan survey, dan wawancara serta pembagian angket kepada responden. Responden untuk penilaian kelayakan fasilitas ini diambil secara purposive sampling dengan masing-masing tempat penilitian adalah sebanyak 25 responden. Penilaian kelayakan ini menilai dari jumlah ketersediaan fasilitas pelabuhan, dari fasilitas pokok, penilaian diambil sebanyak 16 parameter pertanyaan penilaian yang diperoleh dari pengembangan jumlah ketersediaan fasilitas pokok dari pembahasan sub bab sebelumnya adalah 11 parameter. Fasilitas fungsional dinilai dengan 31 parameter pertanyaan dari jumlah ketersediaan fasilitas fungsional sebanyak 22 parameter fasilitas. Fasilitas penunjang dinilai dengan parameter penilaian sebanyak 19 parameter pertanyaan dari 10 ketersediaan fasilitas penunjang sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan.

4.3.1.1 Fasilitas Pokok PPP Mayangan

Fasilitas pokok di PPP Mayangan dinilai secara kelayakan oleh responden dengan penilaian berdasarkan bentuk bangunan, pemfungsiannya, pemakaiannya yang diperoleh peniliti dari pengajuan angket yang tersedia di bab sebelumnya dan dibatasi oleh dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Adapun penilaiaan kelayakan fasilitas pokok PPP Mayangan dengan ketersediaan fasilitas sejumlah 11 fasilitas dan 16 parameter pertanyaan dari 25 responden dapat dilihat pada Tabel 36 dan Gambar 65 mengenai grafik kelayakan fasilitas pokok PPP Mayangan yang tersaji di bawah ini.

Tabel 36. Hasil penilaian kelayakan fasilitas pokok PPP Mayangan

Fasiltas Pokok		Persen
Tidak layak	0	-
Kurang layak	2	12.50
Layak	8	50.00
Sangat Layak	6	37.50

Keterangan:

Tidak layak : 0 - < 1,5

Kurang layak : 1,5 - < 2,5

Layak : 2,5 - < 3,5

Sangat layak : > 3,5

Tabel 36 di atas data hasil penelitian yang diperoleh dari responden yang menilai tentang kelyakan fasilitas pokok di PPP Mayangan dengan jumlah parameter pertanyaan sebanyak 16 parameter. Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa fasilitas pokok di PPP tamperan dinilai layak hasil ini diperoleh dari seluruh rata-rata penilaian fasilitas pokok PPP Mayangan dengan hasil nilai 3,28 dengan kriteria penilaian kelayakan masuk dalam kriteria layak. Di bawah ini tersaji Gambar 65 grafik penilaian kelayakan fasilitas pokok PPP Mayangan dalam persentase.

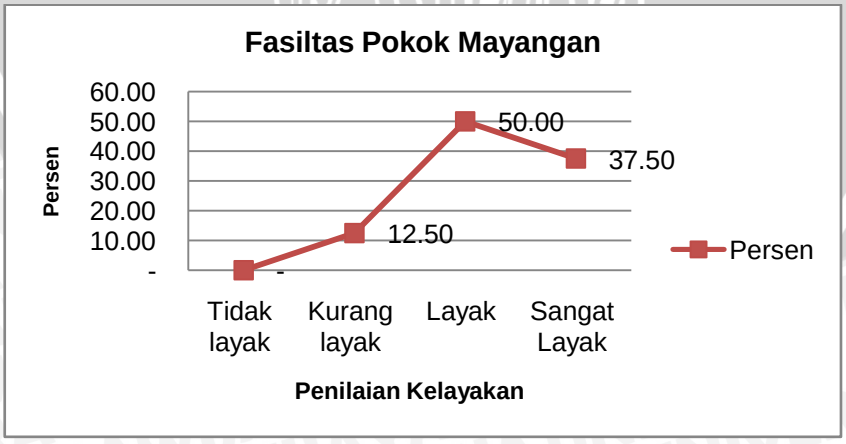

Gambar 65. Grafik hasil penilaian kelayakan fasilitas pokok PPP Mayangan

4.3.1.2 Fasilitas Fungsional PPP Mayangan

Fasilitas fungsional PPP Mayangan secara ketersediaan berjumlah 18 parameter dari keseluruhan ketersediaan 22 parameter sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Penilaian kelayakan fasilitas fungsional berdasarkan jumlah parameter keseluruhan ketersediaan sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan yang berjumlah 22 parameter. Yang mana dari 22 parameter tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan yang mencakup tentang fasilitas fungsional PPP Mayangan yang berjumlah 31 parameter pertanyaan yang dinilai oleh 25 responden. Penilaian kelayakan ini didasarkan dari ukuran dan pemakaian fasilitas fungsional di PPP Mayangan. Adapun hasil dari penilaian kelayakan fasilitas fungsional PPP Mayangan tersaji pada Tabel 37 di bawah ini.

Tabel 37. Hasil penilaian kelayakan fasilitas fungsional PPP Mayangan

Fasiltas Fungsional		Persen
Tidak layak	10	32.26
Kurang layak	5	16.13
Layak	10	32.26
Sangat Layak	6	19.35

Keterangan:

Tidak layak : 0 - < 1,5

Kurang layak : 1,5 - < 2,5

Layak : 2,5 - < 3,5

Sangat layak : > 3,5

Data tabel di atas diperoleh dari hasil penilaian 25 responden dari 31 parameter pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang tersaji di bab sebelumnya. Ada 10 parameter pertanyaan yang dengan hasil tidak layak, 5 parameter pertanyaan dengan hasil kurang layak, 10 parameter pertanyaan

dengan hasil layak, dan 6 parameter pertanyaan dengan hasil sangat layak. Hasil seluruh penilaian rata-rata kelayakan fasilitas fungsional PPP Mayangan adalah 2,18 yang mana kriteria hasilnya yaitu kurang layak. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 66 grafik penilaian kelayakan fasilitas fungsional PPP Mayangan dalam persentase.

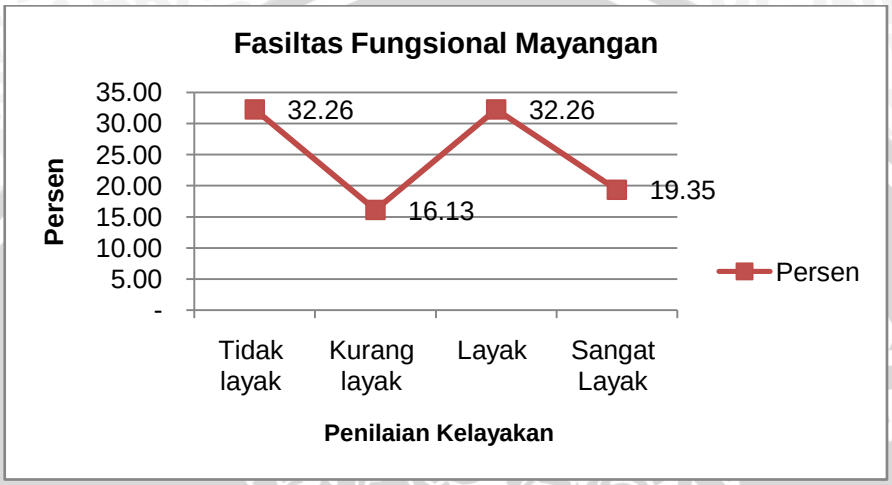

Gambar 66. Grafik hasil penilaian kelayakan fasilitas fungsional PPP Mayangan

4.3.1.3 Fasilitas Penunjang PPP Mayangan

Fasilitas penunjang PPP Mayangan secara ketersediaan berjumlah 6 parameter dari keseluruhan ketersediaan 10 parameter sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Penilaian kelayakan fasilitas penunjang berdasarkan jumlah parameter keseluruhan ketersediaan sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan yang berjumlah 10 parameter. Penilaian kelayakan dari 10 parameter tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan yang mencakup tentang fasilitas penunjang PPP Mayangan yang berjumlah 19 parameter pertanyaan yang dinilai oleh 25 responden. Penilaian kelayakan ini didasarkan dari ukuran dan pemakaian fasilitas penunjang di PPP Mayangan. Adapun hasil dari penilaian kelayakan fasilitas penunjang PPP Mayangan tersaji pada Tabel 38 di bawah ini.

Tabel 38. Hasil penilaian kelayakan fasilitas penunjang PPP Mayangan

Fasiltas Penunjang		Persen
Tidak layak	8	42.11
Kurang layak	0	-
Layak	5	26.32
Sangat Layak	6	31.58

Keterangan:

Tidak layak : 0 - < 1,5

Kurang layak : 1,5 - < 2,5

Layak : 2,5 - < 3,5

Sangat layak : > 3,5

Data tabel di atas diperoleh dari hasil penilaian 25 responden dari 19 parameter pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang tersaji di bab sebelumnya. Ada 8 parameter pertanyaan yang dengan hasil tidak layak, tidak ada penilaian kurang layak untuk fasilitas penunjang di PPP Mayangan, 5 parameter pertanyaan dengan hasil layak, dan 6 parameter pertanyaan dengan hasil sangat layak. Hasil seluruh penilaian rata-rata kelayakan fasilitas penunjang PPP Mayangan adalah 2,16 yang mana kriteria hasilnya yaitu kurang layak. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 67 grafik penilaian kelayakan fasilitas penunjang PPP Mayangan dalam persentase.

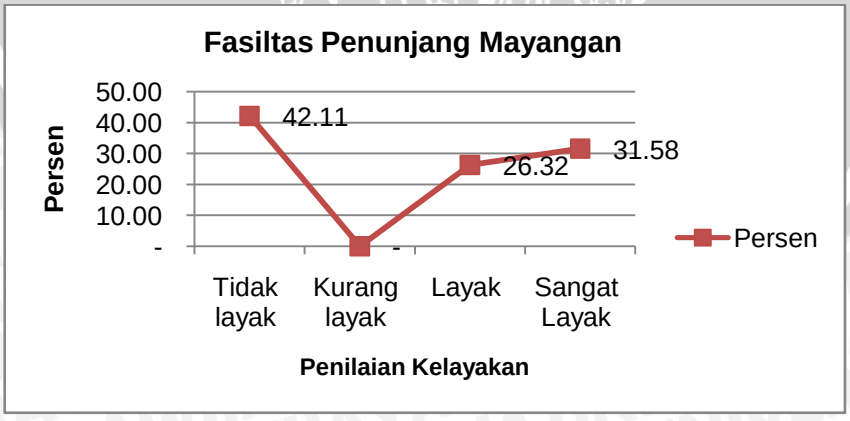

Gambar 67. Grafik hasil penilaian kelayakan fasilitas penunjang PPP Mayangan

4.3.1.4 Fasilitas keseluruhan PPP Mayangan

Penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Mayangan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang. Data semua fasilitas dijadikan satu yaitu semua penilaiannya mencakup 43 parameter dan 66 parameter pertanyaan. Parameter penilaian yang berjumlah 43 ini adalah parameter ketersediaan fasilitas pelabuhan sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Penilaian kelayakan fasilitas dengan 43 parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 39 tentang hasil penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Mayangan yang tersaji di bawah ini.

Tabel 39. Hasil penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Mayangan

Fasiltas Keseluruhan		Persen
Tidak layak	18	27.27
Kurang layak	7	10.61
Layak	23	34.85
Sangat Layak	18	27.27

Keterangan:

Tidak layak : 0 - < 1,5

Kurang layak : 1,5 - < 2,5

Layak : 2,5 - < 3,5

Sangat layak : > 3,5

Tabel 39 di atas diperoleh dari hasil penilaian 25 responden dari 66 parameter pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang tersaji di bab sebelumnya. Ada 18 parameter pertanyaan yang dengan hasil tidak layak, 7 parameter pertanyaan dengan hasil kurang layak, 23 parameter pertanyaan dengan hasil layak, dan 18 parameter pertanyaan dengan hasil sangat layak. Hasil seluruh penilaian rata-rata penilaian keseluruhan kelayakan fasilitas PPP Mayangan adalah 2,44 yang mana kriteria hasilnya yaitu kurang layak. Lebih

jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 68 grafik penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Mayangan dalam persentase.

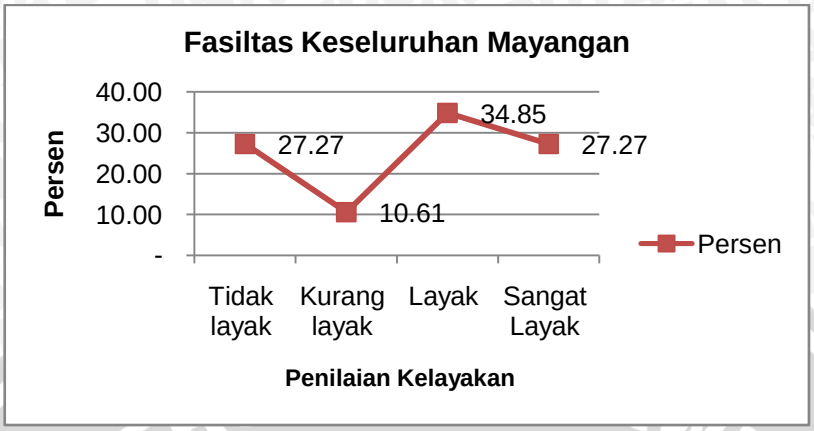

Gambar 68. Grafik hasil penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Mayangan

4.3.2 PPP Tamperan

Penilaian dalam studi kelayakan fasilitas pelabuhan di PPP Tamperan meliputi penilaian bentuk fisik bangunan yang berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan untuk fasilitas pelabuhan. Ketersediaan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang dengan ukuran standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Penilaian ini dilakukan dengan survey, dan wawancara serta pembagian angket kepada responden. Responden untuk penilaian kelayakan fasilitas ini diambil secara purposive sampling dengan masing-masing tempat penilitian adalah sebanyak 25 responden. Penilaian kelayakan ini menilai dari jumlah ketersediaan fasilitas pelabuhan, dari fasilitas pokok, penilaian diambil sebanyak 16 parameter pertanyaan penilaian yang diperoleh dari pengembangan jumlah ketersediaan fasilitas pokok dari pembahasan sub bab sebelumnya adalah 11 parameter. Fasilitas fungsional dinilai dengan 31 parameter pertanyaan dari jumlah

ketersediaan fasilitas fungsional sebanyak 22 parameter fasilitas. Fasilitas penunjang dinilai dengan parameter penilaian sebanyak 19 parameter pertanyaan dari 10 ketersediaan fasilitas penunjang sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan.

4.3.2.1 Fasilitas Pokok PPP Tamperan

Fasilitas pokok di PPP Tamperan dinilai kelayakan fasilitasnya oleh responden dengan penilaian berdasarkan bentuk bangunan, pemfungsiannya, pemakaiannya yang diperoleh peniliti dari pengajuan angket yang tersedia di bab sebelumnya dan dibatasi oleh dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Adapun penilaiaan kelayakan fasilitas pokok PPP Tamperan dengan ketersediaan fasilitas sejumlah 11 fasilitas dan 16 parameter pertanyaan dari 25 responden dapat dilihat pada Tabel 40 dan Gambar 69 mengenai grafik kelayakan fasilitas pokok PPP Tamperan yang tersaji di bawah ini.

Tabel 40. Hasil penilaian kelayakan fasilitas pokok PPP Tamperan

Fasiltas Pokok		Persen
Tidak layak	2	12.50
Kurang layak	5	31.25
Layak	7	43.75
Sangat Layak	2	12.50

Keterangan:

Tidak layak : 0 - < 1,5

Kurang layak : 1,5 - < 2,5

Layak : 2,5 - < 3,5

Sangat layak : > 3,5

Tabel 40 di atas diperoleh dari hasil penilaian 25 responden dari 16 parameter pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang tersaji di bab

sebelumnya. Ada 2 parameter pertanyaan yang dengan hasil tidak layak, 5 parameter pertanyaan dengan hasil kurang layak, 7 parameter pertanyaan dengan hasil layak, dan 2 parameter pertanyaan dengan hasil sangat layak. Hasil seluruh rata-rata penilaian kelayakan fasilitas pokok PPP Tamperan adalah 2,47 yang mana kriteria hasilnya yaitu kurang layak. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 69 grafik penilaian kelayakan fasilitas pokok PPP Tamperan dalam persentase.

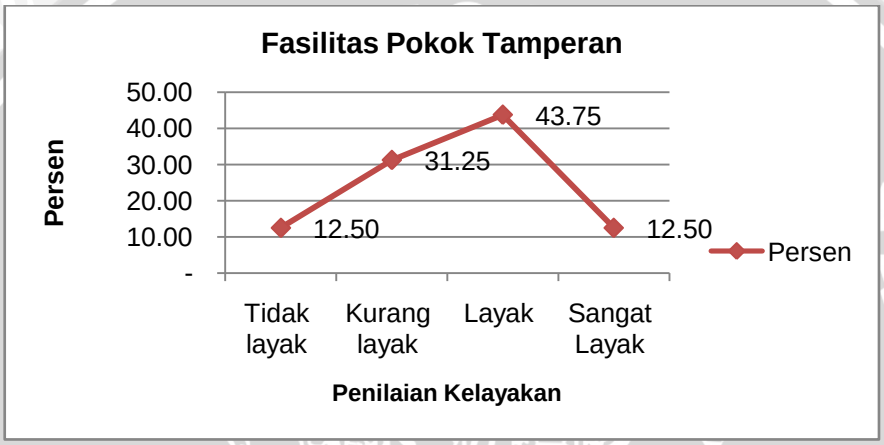

Gambar 69. Grafik hasil penilaian kelayakan fasilitas pokok PPP Tamperan

4.3.2.2 Fasilitas fungsional PPP Tamperan

Fasilitas fungsional PPP Tamperan secara ketersediaan berjumlah 18 parameter dari keseluruhan ketersediaan 22 parameter sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Penilaian kelayakan fasilitas fungsional berdasarkan jumlah parameter keseluruhan ketersediaan sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan yang berjumlah 22 parameter. Yang mana dari 22 parameter tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan yang mencakup tentang fasilitas fungsional PPP Tamperan yang berjumlah 31 parameter pertanyaan yang dinilai oleh 25 responden. Penilaian kelayakan ini didasarkan dari ukuran dan pemakaian

fasilitas fungsional di PPP Tamperan. Adapun hasil dari penilaian kelayakan fasilitas fungsional PPP Tamperan tersaji pada Tabel 41 di bawah ini.

Tabel 41. Hasil penilaian kelayakan fasilitas fungsional PPP Tamperan

Fasiltas Fungsional		Persen
Tidak layak	12	38.71
Kurang layak	5	16.13
Layak	7	22.58
Sangat Layak	7	22.58

Keterangan:

Tidak layak : 0 - < 1,5

Kurang layak : 1,5 - < 2,5

Layak : 2,5 - < 3,5

Sangat layak : > 3,5

Data tabel di atas diperoleh dari hasil penilaian 25 responden dari 31 parameter pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang tersaji di bab sebelumnya. Ada 12 parameter pertanyaan yang dengan hasil tidak layak, 5 parameter pertanyaan dengan hasil kurang layak, 7 parameter pertanyaan dengan hasil layak, dan 7 parameter pertanyaan dengan hasil sangat layak. Hasil seluruh penilaian rata-rata kelayakan fasilitas fungsional PPP Tamperan adalah 2,03 yang mana kriteria hasilnya yaitu kurang layak. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 70 grafik penilaian kelayakan fasilitas fungsional PPP Tamperan dalam persentase.

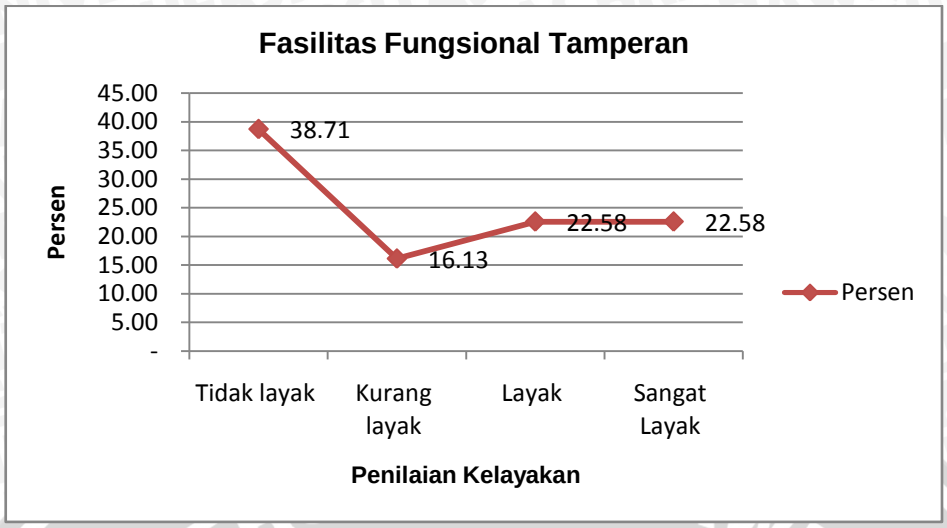

Gambar 70. Grafik hasil penilaian kelayakan fasilitas fungsional PPP Tamperan

4.3.2.3 Fasilitas Penunjang PPP Tamperan

Fasilitas penunjang PPP Tamperan secara ketersediaan berjumlah 8 parameter dari keseluruhan ketersediaan 10 parameter sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Penilaian kelayakan fasilitas penunjang berdasarkan jumlah parameter keseluruhan ketersediaan sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan yang berjumlah 10 parameter. Penilaian kelayakan dari 10 parameter tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan yang mencakup tentang fasilitas penunjang PPP Tamperan berjumlah 19 parameter pertanyaan yang dinilai oleh 25 responden. Penilaian kelayakan ini didasarkan dari ukuran dan pemakaian fasilitas penunjang di PPP Tamperan. Adapun hasil dari penilaian kelayakan fasilitas penunjang PPP Tamperan tersaji pada Tabel 42 di bawah ini.

Tabel 42. Hasil penilaian kelayakan fasilitas penunjang PPP Tamperan

Fasiltas Penunjang		Persen
Tidak layak	4	21.05
Kurang layak	1	5.26
Layak	6	31.58
Sangat Layak	8	42.11

Keterangan:

Tidak layak : 0 - < 1,5

Kurang layak : 1,5 - < 2,5

Layak : 2,5 - < 3,5

Sangat layak : > 3,5

Data Tabel 42 di atas diperoleh dari hasil penilaian 25 responden dari 19 parameter pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang tersaji di bab sebelumnya. Ada 4 parameter pertanyaan yang dengan hasil tidak layak, 1 parameter pertanyaan dengan hasil kurang layak, 6 parameter pertanyaan dengan hasil layak, dan 8 parameter pertanyaan dengan hasil sangat layak. Hasil seluruh penilaian rata-rata kelayakan fasilitas penunjang PPP Tamperan adalah 2,81 yang mana kriteria hasilnya yaitu layak. Lebih jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 71 grafik penilaian kelayakan fasilitas penunjang PPP Tamperan dalam persentase.

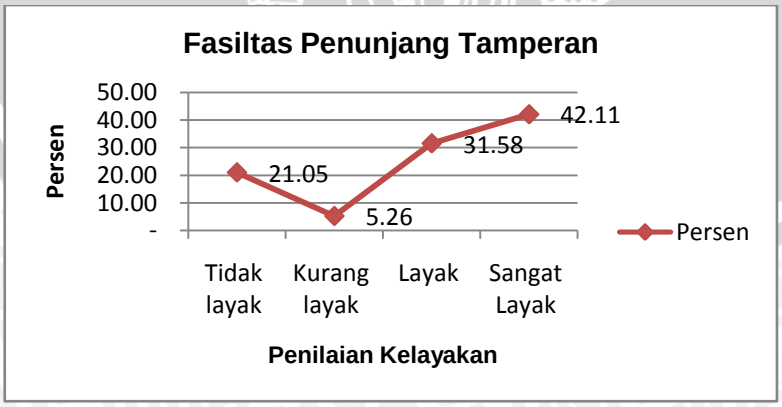

Gambar 71. Grafik hasil penilaian kelayakan fasilitas penunjang PPP Tamperan

4.3.2.4 Fasilitas keseluruhan PPP Tamperan

Penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Tamperan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang. Data semua fasilitas dijadikan satu yaitu semua penilaiannya mencakup 43 parameter dan 66 parameter pertanyaan. Parameter penilaian yang berjumlah 43 ini adalah parameter ketersediaan fasilitas pelabuhan sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Penilaian kelayakan fasilitas dengan 43 parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 43 tentang hasil penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Tamperan yang tersaji di bawah ini.

Tabel 43. Hasil penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Tamperan

Fasiltas Keseluruhan		Persen
Tidak layak	18	27.27
Kurang layak	11	16.67
Layak	20	30.30
Sangat Layak	17	25.76

Keterangan:

Tidak layak : 0 - < 1,5

Kurang layak : 1,5 - < 2,5

Layak : 2,5 - < 3,5

Sangat layak : > 3,5

Tabel 43 di atas diperoleh dari hasil penilaian 25 responden dari 66 parameter pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang tersaji di bab sebelumnya. Ada 18 parameter pertanyaan yang dengan hasil tidak layak, 11 parameter pertanyaan dengan hasil kurang layak, 20 parameter pertanyaan dengan hasil layak, dan 17 parameter pertanyaan dengan hasil sangat layak. Hasil seluruh penilaian rata-rata penilaian keseluruhan kelayakan fasilitas PPP Tamperan adalah 2,36 yang mana kriteria hasilnya yaitu kurang layak. Lebih

jelasnya di bawah ini tersaji Gambar 72 grafik penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Tamperan dalam persentase.

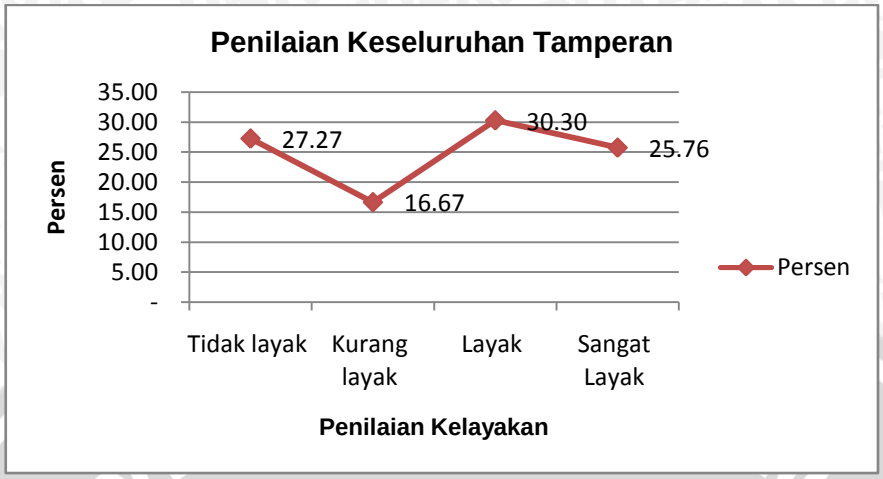

Gambar 72. Grafik hasil penilaian kelayakan fasilitas keseluruhan PPP Tamperan

4.4 Analisa Uji T-test

Hasil analisa uji beda rata-rata atau uji t-test tidak berpasangan untuk perbandingan fasilitas pelabuhan PPP Mayangan dengan PPP Tamperan yang dihasilkan dari data rata-rata keseluruhan penilaian fasilitas masing-masing pelabuhan. Lebih jelasnya dalam pembahasan uji t-test tidak berpasangan untuk fasilitas pelabuhan yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang dijelaskan dengan tiap-tiap pembahasan seperti di di bawah ini.

4.4.1 Uji Beda antara Fasilitas Pokok pada PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Hasil pengujian beda rata-rata fasilitas pokok PPP Mayangan dengan PPP Tamperan dapat dijelaskan dengan analisis diskripsi fasilitas pokok terlebih dahulu seperti pada Tabel 44 yang tersaji di bawah ini

Tabel 44. Analisis Deskripsi Fasilitas Pokok

	Tempat	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Fasilitas_Pokok	Mayangan	16	3,2825	,56897	,14224
	Tamperan	16	2,4725	,93011	,23253

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif pada Tabel 44 di atas dapat diketahui bahwa dari 16 parameter pertanyaan yang diajukan kepada 25 responden di PPP Mayangan yang sebagai tempat penelitian, menghasilkan penilaian terhadap fasilitas pokok pada PPP Mayangan adalah dengan rata–rata sebesar 3,2825, sedangkan 16 parameter pertanyaan yang sama yang diajukan kepada responden di PPP Tamperan memberikan penilaian terhadap fasilitas pokok pada PPP Tamperan dengan rata–rata sebesar 2,4725. Dan lebih jelasnya mengenai perhitungan uji t tidak berpasangan pada uji beda rata-rata fasilitas pokok pada PPP Mayangan dengan PPP Tamperan dijelaskan pada Tabel 45 di bawah ini.

Tabel 45. Uji t tidak berpasangan fasilitas pokok PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Fasilitas_Pokok	Equal variances assumed	1,363	,252	2,972	30	,006	,81000	,27258	,25331	1,36669
	Equal variances not assumed			2,972	24,847	,006	,81000	,27258	,24843	1,37157

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t, data yang diperoleh untuk setiap perlakuan dianalisa kehomogenan ragamnya dengan menggunakan uji *homogenity of variance* (uji levene) dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai ragam yang sama. Pada hasil pengujian menunjukkan nilai dari levene test sebesar 1,363 dengan nilai signifikansi sebesar 0,252 yang lebih besar dari alpha 0,05. oleh karena nila p (sig) > 0,05, maka Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan mempunyai ragam yang homogen.

Berdasarkan pada Tabel 45 di atas menunjukkan nilai t hitung untuk *equal variances assumed* (ragam yang homogen) sebesar 2,972, sedangkan t tabel dengan derajat bebas sebesar 30 dan α = 5% sebesar 2,042. Karena t hitung > t tabel atau nilai p (sig) < α (0,006 < 0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada fasilitas pokok di PPP Mayangan dengan PPP Tamperan. Fasilitas pokok di PPP Mayangan bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan di PPP Tamperan karena memiliki nilai rata-rata yang lebih besar.

4.4.2 Uji Beda antara Fasilitas Fungsional pada PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Hasil pengujian beda rata-rata fasilitas fungsional PPP Mayangan dengan PPP Tamperan dapat dijelaskan dengan analisis diskripsi fasilitas fungsional terlebih dahulu seperti pada Tabel 46 yang tersaji di bawah ini

Tabel 46. Analisis Deskripsi Fasilitas fungsional

	Tempat	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Fungsional	Mayangan	31	2,1794	1,44650	,25980
	Tamperan	31	2,0284	1,47401	,26474

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif pada Tabel 46 di atas dapat diketahui bahwa dari 31 parameter pertanyaan yang diajukan kepada 25 responden di PPP Mayangan yang sebagai tempat penelitian, menghasilkan penilaian terhadap fasilitas fungsional pada PPP Mayangan adalah dengan rata–rata sebesar 2,1794, sedangkan 31 parameter pertanyaan yang sama yang diajukan kepada responden di PPP Tamperan memberikan penilaian terhadap fasilitas fungsional pada PPP Tamperan dengan rata–rata sebesar 2,0284. Dan lebih jelasnya mengenai perhitungan uji t tidak berpasangan pada uji beda rata-

rata fasilitas fungsional pada PPP Mayangan dengan PPP Tamperan dijelaskan pada Tabel 47 di bawah ini.

Tabel 47. Uji t tidak berpasangan fasilitas fungsional PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Fungsional	Equal variances assumed	,176	,676	,407	60	,685	,15097	,37092	-,59099	,89292
	Equal variances not assumed			,407	59,979	,685	,15097	,37092	-,59099	,89293

Pada pengujian t-test beda rata-rata ini hal yang dilakukan sebelum pengujian dengan menggunakan uji t, data yang diperoleh untuk setiap perlakuan dianalisa kehomogenan ragamnya dengan menggunakan uji *homogenity of variance* (uji levene) dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai ragam yang sama. Pada hasil pengujian menunjukkan nilai dari levene test sebesar 0,176 dengan nilai signifikansi sebesar 0,676 yang lebih besar dari alpha 0,05. oleh karena nila p (sig) > 0,05, maka Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan mempunyai ragam yang homogen.

Berdasarkan pada Tabel 47 di atas menunjukkan nilai t hitung untuk *equal variances assumed* (ragam yang homogen) sebesar 0,407, sedangkan t tabel dengan derajat bebas sebesar 60 dan α = 5% sebesar 2,000. Karena t hitung < t tabel atau nilai p (sig) > α (0,685 > 0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada fasilitas fungsional di PPP Mayangan dengan fasilitas fungsional

di PPP Tamperan. Dengan kata lain fasilitas fungsional di PPP Mayangan bisa dikatakan sama dengan di PPP Tamperan.

4.4.3 Uji Beda antara Fasilitas Penunjang pada PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Hasil pengujian beda rata-rata fasilitas penunjang PPP Mayangan dengan PPP Tamperan dapat dijelaskan dengan analisis diskripsi fasilitas penunjang terlebih dahulu seperti pada Tabel 48 yang tersaji di bawah ini

Tabel 48. Analisis Deskripsi Fasilitas Penunjang

	Tempat	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Penunjang	Mayangan	19	2,1558	1,72304	,39529
	Tamperan	19	2,8105	1,30393	,29914

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif pada Tabel 48 di atas dapat diketahui bahwa dari 19 parameter pertanyaan yang diajukan kepada 25 responden di PPP Mayangan yang sebagai tempat penelitian, menghasilkan penilaian terhadap fasilitas penunjang pada PPP Mayangan adalah dengan rata–rata sebesar 2,1558, sedangkan 19 parameter pertanyaan yang sama yang diajukan kepada responden di PPP Tamperan memberikan penilaian terhadap fasilitas penunjang pada PPP Tamperan dengan rata–rata sebesar 2,8105. Dan lebih jelasnya mengenai perhitungan uji t tidak berpasangan pada uji beda rata-rata fasilitas penunjang pada PPP Mayangan dengan PPP Tamperan dijelaskan pada Tabel 49 di bawah ini.

Tabel 49. Uji t tidak berpasangan fasilitas penunjang PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Penunjang	Equal variances assumed	6,936	,012	-1,321	36	,195	-,65474	,49572	-1,66011	,35064
	Equal variances not assumed			-1,321	33,525	,196	-,65474	,49572	-1,66270	,35322

Pada pengujian t-test beda rata-rata ini hal yang dilakukan sebelum pengujian dengan menggunakan uji t adalah data yang diperoleh untuk setiap perlakuan dianalisa kehomogenan ragamnya dengan menggunakan uji *homogenity of variance* (uji levene) dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai ragam yang sama. Pada hasil pengujian menunjukkan nilai dari levene test sebesar 6,936 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari alpha 0,05. oleh karena nila p (sig) < 0,05, maka Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan mempunyai ragam yang tidak homogen.

Berdasarkan pada Tabel 49 di atas menunjukkan nilai t hitung untuk *equal variances not assumed* (ragam yang tidak homogen) sebesar -1,321, sedangkan t tabel dengan derajat bebas sebesar 33,5 dan α = 5% sebesar 2,034. Karena t hitung < t tabel atau nilai p (sig) > α (0,195 > 0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada fasilitas penunjang di PPP Mayangan dengan di PPP Tamperan. Fasilitas penunjang di PPP Mayangan bisa dikatakan lebih sama dengan di PPP Tamperan.

4.4.4 Uji Beda antara Fasilitas pelabuhan secara keseluruhan atau fasilitas gabungan pada PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Hasil pengujian beda rata-rata fasilitas pelabuhan PPP Mayangan dengan PPP Tamperan dapat dijelaskan dengan analisis diskripsi fasilitas pelabuhan terlebih dahulu seperti pada Tabel 50 yang tersaji di bawah ini

Tabel 50. Analisis Deskripsi Fasilitas Pelabuhan

Group Statistics

	Tempat	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Gabungan	Mayangan	66	2,4400	1,44682	,17809
	Tamperan	66	2,3612	1,33722	,16460

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif pada Tabel 50 di atas dapat diketahui bahwa dari 66 parameter pertanyaan yang diajukan kepada 25 responden di PPP Mayangan yang sebagai tempat penelitian, menghasilkan penilaian terhadap fasilitas pelabuhan pada PPP Mayangan adalah dengan rata–rata sebesar 2,4400, sedangkan 66 parameter pertanyaan yang sama yang diajukan kepada responden di PPP Tamperan memberikan penilaian terhadap fasilitas pelabuhan pada PPP Tamperan dengan rata–rata sebesar 2,3612. Dan lebih jelasnya mengenai perhitungan uji t tidak berpasangan pada uji beda rata-rata fasilitas pelabuhan pada PPP Mayangan dengan PPP Tamperan dijelaskan pada Tabel 51 di bawah ini.

Tabel 51. Uji t tidak berpasangan fasilitas pelabuhan PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Gabungan	Equal variances assumed	,670	,415	,325	130	,746	,07879	,24251	-,40098	,55856
	Equal variances not assumed			,325	129,202	,746	,07879	,24251	-,40101	,55859

Pada pengujian t-test beda rata-rata ini hal yang dilakukan sebelum pengujian dengan menggunakan uji t adalah data yang diperoleh untuk setiap perlakuan dianalisa kehomogenan ragamnya dengan menggunakan uji *homogenity of variance* (uji levene) dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai ragam yang sama. Pada hasil pengujian menunjukkan nilai dari levene test sebesar 0,670 dengan nilai signifikansi sebesar 0,415 yang lebih besar dari alpha 0,05. oleh karena nila p (sig) > 0,05, maka Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan mempunyai ragam yang homogen.

Berdasarkan pada Tabel 51 di atas menunjukkan nilai t hitung untuk *equal variances assumed* (ragam yang homogen) sebesar 0,325, sedangkan t tabel dengan derajat bebas sebesar 130 dan α = 5% sebesar 1,978. Karena t hitung < t tabel atau nilai p (sig) > α (0,746 > 0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada gabungan di tempat mayangan dengan tamperan. Penilaian gabungan di mayangan bisa dikatakan sama dengan di tamperan.

4.5 Perbandingan hasil analisa kelayakan antara PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

Penilaian perbandingan kelayakan fasilitas pelabuhan antara PPP Mayangan dengan PPP Tamperan sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Berdasarkan jumlah parameter penilaian ketersediaan fasilitas pelabuhan sejumlah 43 fasilitas dengan 66 pamater pertanyaan dengan 25 responden pada masing-masing tempat penilitian maka diperoleh hasil bahwa PPP Mayangan memiliki penilaian kelayakan dengan kriteria kurang layak begitu juga dengan

penilaian yang diberikan oleh responden di PPP tamperan yang menilai bahwa fasilitas pelabuhan di PPP Tamperan kurang layak. Hasil ini diperoleh dari penilaian ketersediaan fasilitas, dan kelayakan fasilitas yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan.

Berdasarkan hasil penilitian tersebut di atas dapat diketahui laju pembangunan di PPP Mayangan dan laju pembangunan di PPP Tamperan ke arah ke depan menuju tingkat pelabuhan perikanan selanjutnya yaitu tingkat Pelabuhan Perikanan Nusantara masih harus lebih ditingkatakan lagi, dari segi ketersediaan fasilitas, serta pengelolaan fasilitas sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Untuk PPP Mayangan secara kondisi dan luas lahan pelabuhan masih mencukupi untuk arah pelabuhan perikanan ke tingkat selanjutnya dan PPP Tamperan untuk pengembangan pelabuhan perikanan ke tingkat selanjutnya atau ke Pelabuhan Perikanan Nusantara banyak hal yang perlu dilakukan yang lebih mendasar adalah tentang perluasan lahan yang mana sebenarnya luas lahan PPP Tamperan tidak sesuai dengan syrat yang ada di dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan. Adapun hal lain yang menentukan untuk peningkatan kriteria atau status pelabuhan perikanan selain ditinjau dari perkembangan fasilitas pelabuhan masih ada hal lainnya yaitu hasil volume tangkapan ikan yang didaratkan setiap hari di pelabuhan perikanan mencapai kapasitas rata-rata 30 ton/hari, daya tampung armada penangkapan dalam kapasitas lebih dari 2250 GT, dan kedalaman kolam labuh > 3 m dengan panjang dermaga 150 m sampai dengan 300 m, luas lahan 15 Ha sampai 30 Ha, terdapat tata ruang atau zonasi pengolahan atau pengembangan industri perikanan.

Hasil penilaian perbandingan kelayakan fasilitas pelabuhan PPP Mayangan dengan PPP Tamperan untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 73 sampai dengan Gambar 75 yang tersaji di bawah ini.

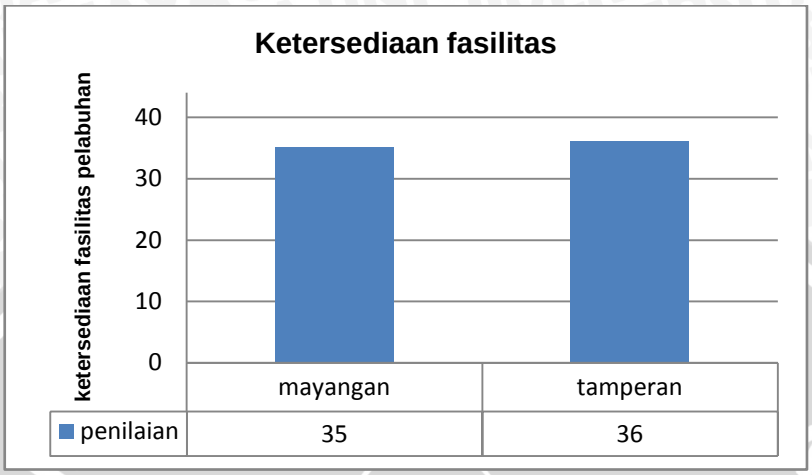

Gambar 73. Grafik hasil penilaian ketersediaan fasilitas keseluruhan PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

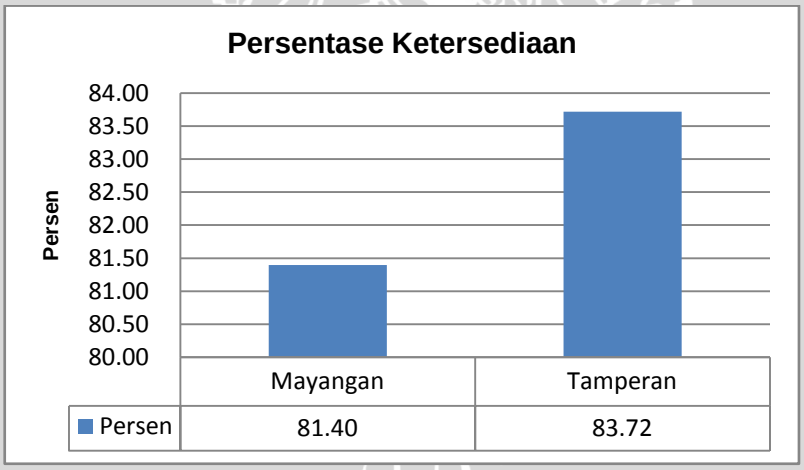

Gambar 74. Grafik hasil penilaian presentase ketersediaan fasilitas keseluruhan PPP Mayangan dengan PPP Tamperan

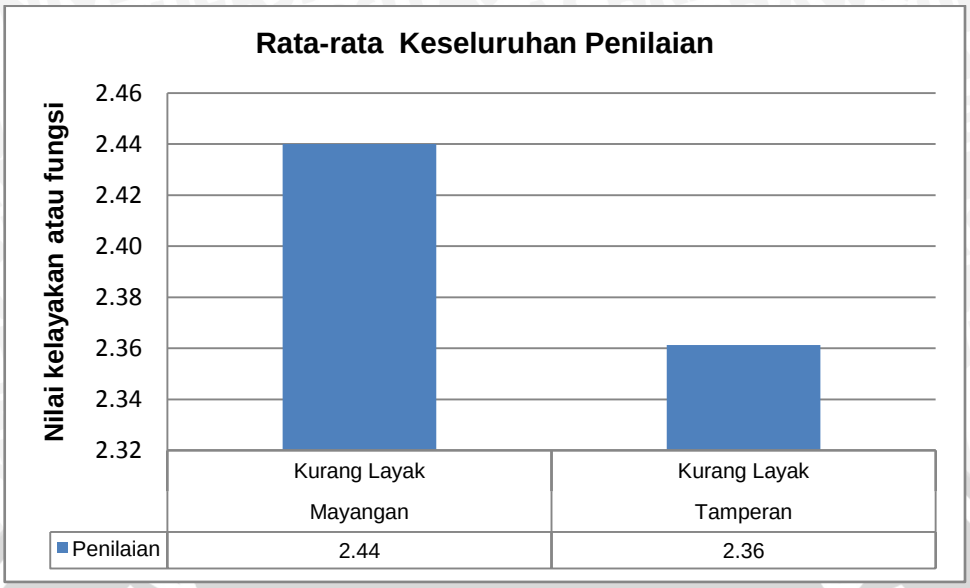

Gambar 75. Grafik hasil penilaian presentase ketersediaan fasilitas keseluruhan PPP Mayangan dengan PPP Tamperan